DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 05 Januari-Juni 2020

Geliat Industri Migas
di Tengah Pandemi Covid-19

SAJIAN UTAMA

Punya Potensi Besar, **Investasi Migas Masih Menarik** di Tengah Pandemi Covid-19

SOROT

Satu Dekade **400.269 SR**, Pembangun Jargas Terus Berlanjut

BERANDA

Migas *Data Repository* (MDR) untuk Kemudahan Akses Data

Geliat Industri Migas di Tengah Pandemi Covid-19

JURNAL MIGAS
Issue 05 Januari-Juni 2020

Kondisi industri migas di awal tahun 2020 jauh lebih kompleks lantaran pandemi Covid-19. Harga minyak global dan jumlah permintaan turun secara signifikan. Hal ini pun tentu berimbas pada kondisi sektor migas di suatu negara, termasuk seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalamnya.

Sektor-sektor lainnya pun turut terkena dampak pandemi Covid-19. Singkatnya, pandemi membuat babak belur. Berdampak buruk ke kesehatan masyarakat, ekonomi dan sektor-sektor lainnya.

Meski begitu, siap tak siap, kita harus menghadapi kondisi ini. Alih-alih 'berpangku tangan' terhadap kondisi pandemi Covid-19, kita harus mulai 'melihat' bahwa banyak hal-hal baru dari pandemi ini. Gairah baru, misalnya, yang muncul dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Yang jelas, optimisme harus tetap digelorakan.

Sajian Utama Jurnal Migas edisi ini mengupas tentang berbagai upaya *stakeholder* migas di tanah air untuk tetap menjaga kelangsungan industri migas. Berbagai artikel dengan tema lainnya juga kami hadirkan di edisi ini, misalnya pembangunan jargas, gasifikasi gas batu bara dan lain-lain.

Semoga berbagai yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca.

24 >> SOROT
Satu Dekade 400.269 SR, Pembangunan Jargas Terus Berlanjut

Dengan menggunakan dana APBN, Pemerintah Indonesia telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sejak tahun 2009 hingga saat ini. Selama satu dekade (2009-2019), telah terbangun sebanyak 400.269 sambungan rumah (SR).

10 >> SAJIAN UTAMA
Punya Potensi Besar, Investasi Migas Masih Menarik di Tengah Pandemi Covid-19

Industri migas di tanah air tetap memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ditambah dengan stimulus dari Pemerintah, seperti dibukanya akses data, gairah investasi dapat ditumbuhkan di tengah pandemi Covid-19.

contents

6 >> SAJIAN UTAMA
Geliat Industri Migas di Tengah Pandemi Covid-19
Pandemi virus Corona atau Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri. Tak terkecuali industri migas. Meski begitu, para *stakeholder* migas di tanah air tetap berupaya menjaga kelangsungan salah satu industri vital tersebut.

JURNAL MIGAS
Issue 05 Januari-Juni 2020

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
ISSN 2528-4169

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab **Sekretaris Direktorat Jenderal Migas**
Redaktur **Mohammad Alfansyah**
Editor/ Penyunting **Akhmad Fauzi Budiman, Rizky Amalia Wismashanti**
Desain Grafis dan Fotografer **Agustiawan Mendrofa, Krisna Dinda Bestari**
Sekretariat **Sinta Raesanti, Kabul Priyono,**
Kontributor **Tursilowulan Wahyu, Dian Apriani**

6 **SAJIAN UTAMA**
Geliat Industri Migas di Tengah Pandemi Covid-19

10 Punya Potensi Besar, Investasi Migas Masih Menarik di Tengah Pandemi Covid-19

14 **SOROT**
Gasifikasi Gas Batu Bara untuk Tekan Impor LPG

20 Penurunan Harga Gas untuk Industri Dorong Pertumbuhan Ekonomi

24 Satu Dekade 400.269 SR, Pembangunan Jargas Terus Berlanjut

28 **BERANDA**
Migas Data Repository (MDR) untuk Kemudahan Akses Data

31 Aktif Cegah Penyebaran dan Penularan Pandemi Covid-19

30 Upaya Menjaga Kelangsungan Industri Migas di Tengah Pandemi Covid-19

34 **PERUBAHAN**
Dongkrak Kinerja, Ditjen Migas Luncurkan "Si Merak"

36 Agen Perubahan : Salam Perubahan

38 **NEWS**
Tindak Lanjut DIPA Tahun 2020, Pejabat Eselon I dan II Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

Road to Zero Accident dan Zero Unplanned Shutdown, Ditjen Migas Gelar Pertemuan dengan KKKS

Awasi Penyediaan dan Distribusi BBM, Kementerian ESDM Gandeng Polri dan Kemendagri

Ditjen Migas Paparkan Capaian Ditjen Migas 2019 dan Rencana Kerja 2020

Plt Dirjen Migas Lantik Kepala Susmar Baru

Pengambilan Sumpah dan Janji 63 PNS Ditjen Migas

Plt Dirjen Migas Hadiri *Groundbreaking* Pipa Transmisi Cirebon-Semarang

Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Minyak Baru

Ditandatangani, Komitmen Jual-Beli Gas Blok Masela

Upaya Membentuk Pemimpin Berkarakter, Ditjen Migas Adakan Diklat *Leadership*

Ditjen Migas Gelar Raker Evaluasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2019

Pertamina dan PLN Teken HoA, Pemanfaatan Gas Domestik Meningkat

Ditjen Migas-PAKKEM Gelar Serangkaian Webinar

Lifting Migas Kuartal I Tahun 2020 Lampaui Target Teknis

Ditjen Migas Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Izin Usaha Niaga Migas

Kuartal I 2020, Cadangan Migas 136,5 Juta BOE Ditemukan

Pandemi Covid-19, Target Penerimaan Migas Tahun 2020 Direvisi Jadi Rp100,16 Triliun

Ditjen Migas Serahkan Bingkisan Lebaran untuk ASN Golongan I dan II serta Non ASN

Dorong Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas, Ditjen Migas Fasilitasi Perizinan

Ditjen Migas Gelar Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas

Plt Dirjen Migas Tetapkan Aturan Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) LPG

Cegah Penyebaran Virus Corona, Ditjen Migas Bagikan Medical Kit

Dengan Menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19, Menteri ESDM Lantik Tiga Pejabat Eselon II

Upaya Mengoptimalkan Edukasi Pentingnya BBM Ramah Lingkungan

Ditjen Migas Laksanakan Dua Tahap Rapid Test untuk Seluruh Pegawai

Jelang Tatanan Normal Baru, Kementerian ESDM Tetapkan Sistem Kerja ASN

Pemerintah Tetapkan Aturan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Listrik

Geliat Industri Migas di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi virus Corona atau Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri. Tak terkecuali industri migas. Meski begitu, para *stakeholder* migas di tanah air tetap berupaya menjaga kelangsungan salah satu industri vital tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan guna menekan penyebaran Covid-19 di tanah air. Salah satunya adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diaplikasikan di berbagai wilayah.

Saat bersamaan, masyarakat juga diminta tetap menjaga jarak aman untuk memutus rantai penularan Covid-19. Menjaga jarak aman antar orang secara fisik (*physical distancing*) dan membatasi seluruh akses masuk maupun keluar dan dari suatu wilayah dinilai efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Berdampak pada industri migas

Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 telah berdampak pada industri migas. Terbatasnya aktivitas masyarakat dan penggunaan transportasi umum turut mengganggu *demand & supply* Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri migas bisa dilihat dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama beberapa bulan terakhir berdasarkan perhitungan Formula Indonesia Crude Price (ICP). Pada bulan Maret 2020, misalnya, ICP tertekan menjadi US$34,23 per barel. Ini berarti turun sebesar US$22,38 per barel dari US$56,61 pada Februari 2020.

Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan, penurunan harga rata-rata ICP bulan Maret 2020 ini sejalan dengan perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO serta penyebarannya yang semakin meluas mengakibatkan pemberlakuan *lockdown* di sebagian besar negara konsumen minyak mentah. Pembatasan perjalanan (*travel restriction*) di mayoritas negara di dunia juga mengakibatkan penurunan drastis permintaan minyak mentah secara global. Faktor lainnya adalah perang harga antara Arab Saudi dan Rusia sebagai produsen-produsen utama minyak mentah di dunia, yang menjadi salah satu faktor penyebab *over supply* minyak mentah secara global.

Penurunan harga minyak mentah di pasar internasional juga disebabkan OPEC melaporkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia yang ditandai dengan penurunan proyeksi pertumbuhan GDP Dunia tahun 2020 sebesar 0,6% menjadi sebesar 2,4% akibat melemahnya perekonomian sejumlah negara maju dan dampak serangan Covid-19.

Selain itu, International Energy Agency (IEA) dan OPEC melaporkan penurunan proyeksi permintaan minyak mentah global tahun 2020 dari publikasi bulan sebelumnya:

- IEA melaporkan proyeksi permintaan minyak mentah global di tahun 2020 turun sebesar 1,1 juta barel per hari menjadi 99,90 juta barel per hari.
- OPEC melaporkan proyeksi permintaan minyak mentah global di tahun 2020 turun sebesar 1 juta barel per hari menjadi 99,73 juta barel per hari.

Presiden RI Joko Widodo telah meminta jajaran terkait untuk meng-hitung dampak penurunan harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia, terutama BBM.

Selain itu, Presiden juga meminta perhitungan perkiraan jangka waktu penurunan akan terjadi serta perkiraan harga ke depan. Menurut Presiden, keadaan ini harus direspon dengan kebijakan yang tepat. Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk perekonomian negara.

Terkait harga BBM Umum, belum lama ini Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Aturan ini diteken 28 Februari 2020 dan berlaku tanggal 1 Maret 2020.

Penetapan bertujuan untuk menjaga kestabilan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dinyatakan dalam Kepmen ini, Menteri ESDM menetapkan formula harga dasar sebagai pedoman perhitungan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah untuk setiap liter sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Selanjutnya, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menetapkan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah, berdasarkan formula harga dasar yang telah ditetapkan Menteri ESDM.

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan laporan penetapan harga jual eceran tersebut kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang tidak tercantum dalam Lampiran Kepmen ini, ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Kepmen ESDM Nomor 187 K/IO/MEM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Lampiran, dinyatakan bahwa formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan dengan harga tertinggi, ditentukan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin sebagai berikut:

1. Untuk jenis Bensin dibawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 dengan rumus sebagai berikut: Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus + Rp1.800/liter + Margin (10% dari harga dasar)

2. Untuk jenis Bensin RON 95, jenis Bensin RON 98 dan jenis Minyak Solar CN 51 ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: MOPS atau Argus + Rp2.000/liter + Margin (10% dari harga dasar).

Pasokan terjamin

Meski terbatasnya aktivitas masyarakat yang turut mempengaruhi *demand & supply* BBM, Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan BBM, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan gas bumi serta hasil olahan, seperti pelumas di Indonesia. Untuk menjamin ketersediannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta badan usaha dan bentuk usaha tetap (BU dan BUT) agar tetap beroperasi selama pelaksanaan PSBB. Sektor energi memang menjadi salah satu dari 11 sektor usaha yang tetap diizinkan beroperasi selama PSBB.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menyatakan hal tersebut dalam surat tertanggal 21 April 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan BU dan BUT mengenai prosedur pelaksanaan distribusi bahan bakar dan pelumas dalam rangka PSBB percepatan penanganan Covid-19 pada sub sektor migas.

Dinyatakan, sebagai implementasi Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan mengingat sub sektor migas sebagai sektor strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka kantor pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk badan usaha yang memberikan pelayanan umum terhadap ketersediaan dan distribusi BBM, LPG, serta untuk kegiatan ekspor impor migas, dikecualikan dan tetap beroperasi dalam kondisi PSBB.

Ketentuan ini juga berlaku untuk perusahaan komersil dan swasta yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN), Stasiun Pengisian (Pengangkutan) Bulk LPG (SP(P) BE), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan BBM, LPG dan Gas Bumi, *outlet* ritel (agen industri BBM/LPG, pangkalan LPG dan pelayanan penggantian pelumas untuk kendaraan bermotor), fasilitas produksi, *blending*, dan penyimpanan pelumas serta distributor pelumas, termasuk armada angkutan angkut dan transportasinya.

"Selain itu, perusahaan industri dan kegiatan produksi migas termasuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi hulu migas, serta *lifting* minyak bumi, kondensat dan gas bumi serta LPG di titik penyerahan," kata Ego belum lama ini.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional ini, Pemerintah juga mewajibkan BU dan BUT bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan, dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang, menyediakan masker dan fasilitas cuci tangan serta berpedoman pada protokal kesehatan dan peraturan perundangan.

BU dan BUT juga diharapkan menyediakan *call center* selama berlangsungnya darurat pandemik Covid-19 dan melaporkan perkembangan proses bisnis kepada Ditjen Migas.

Sejak diberlakukannya PSBB di berbagai wilayah sejak awal April lalu hingga sekarang, pasokan dan pendistribusian BBM serta LPG tetap berjalan lancar dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Pasokan nasional untuk produk jenis gasoline, yakni Premium, Pertalite, dan Pertamax berada pada level aman di atas 22 hari dan Minyak Tanah mencapai 89 hari. Sementara produk jenis *gasoil*, yakni Solar dan Dexlite, dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.

Ketersediaan LPG juga tetap memadai untuk mendukung aktivitas rumah tangga yang cenderung meningkat. Pasokan LPG secara nasional saat ini berada di level 16 hari. Peningkatan konsumsi LPG terjadi di sektor LPG untuk rumah tangga. LPG 3 kg mengalami kenaikan konsumsi harian hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari konsumsi normal sebesar 21.927 metrik ton.

Khusus untuk wilayah Jabodetabek, dilakukan penambahan pasokan LPG 3 kg hampir mencapai 50%, pada April 2020. Total penambahan pasokan LPG 3 kg untuk wilayan Jakarta mencapai 150.000 tabung. Sementara di Tangerang Raya (Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kab Tangerang) akan ditambah hingga 490.000 tabung. Sedangkan, Bogor, Depok, serta Bekasi (Kota dan Kabupaten) berturut-turut memiliki pasokan fakultatif sebesar 67.000, 31.000 dan 1 juta tabung gas LPG 3 kg.

Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan lainnya guna mendukung tetap beroperasinya industri migas. Salah satunya merujuk Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020. Dalam Surat Keputusan itu, Pemerintah memperpanjang masa berlaku Persetujuan Layak Operasi (PLO) atau Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu masa status keadaan tentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona atau Covid-19, sampai tiga bulan sesudahnya.

Selain itu, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengelasan pada kegiatan usaha migas dan mempertimbangkan kondisi status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas memberikan perpanjangan masa berlaku sampai dengan dua bulan setelah berakhirnya masa darurat, terhadap pengesahan kualifikasi ahli las yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu masa darurat ini hingga satu bulan setelahnya.

Apresiasi kepada KKKS

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapreasiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang tetap menjaga kegiatan operasi migas tetap berjalan, meski industri hulu migas terdampak pandemi Covid-19 dan rendahnya harga minyak dunia. Apresiasi itu disampaikan Menteri ESDM dalam rapat koordinasi dengan para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

"Pak Menteri ESDM menyampaikan terima kasih kepada Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik yang sudah menjaga operasi migas tetap berjalan lancar, walaupun kita tahu harga minyak masih turun naik," ungkap Kepala Inspeksi Migas sekaligus Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Adhi Wibowo dalam diskusi secara virtual dengan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik kegiatan usaha hulu migas, Selasa (5/5) dan Rabu (6/5).

Hingga saat ini, industri migas masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, kegiatan operasi migas harus tetap berjalan dengan berpedoman para protokol Covid-19.

"Protokol Covid-19 harus tetap dijalankan. Kepala Teknik selain menjaga *safety* peralatan, juga harus menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja," ujar Adhi menirukan pesan Menteri ESDM.

Terkait pencegahan Covid-19 pada kegiatan usaha migas selama PSBB, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial telah mengeluarkan surat yang mewajibkan badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan, dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang, menyediakan masker dan fasilitas cuci tangan serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundangan. ●

Kementerian ESDM Pangkas Anggaran

Kementerian ESDM memangkas anggaran sektor migas, energi baru terbarukan, dan badan geologi hingga Rp3,46 triliun akibat pandemi Covid-19. Pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk membantu penanganan Covid-19.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (23/6), menjelaskan, kriteria anggaran yang dipotong adalah belanja barang seperti perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat, honorarium yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya.

Selain itu, blokir anggaran yang belum dapat dipenuhi data dukung pembukaan blokirnya. Juga, pekerjaan infrastruktur yang tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2020 dan tidak urgent atau bukan untuk daerah remote.

"Anggaran lain yang dipotong adalah renovasi atau pembangunan gedung dan pekerjaan swakelola yang dapat ditunda ke tahun 2021," tambah dia.

Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020.

Refecusing anggaran Kementerian ESDM terutama pada pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Ditjen Migas, EBTKE dan Badan Geologi.

Khusus Ditjen Migas, anggaran yang semula 3,72 triliun juga dipangkas. Dengan demikian, pembangunan jargas yang semula direncanakan 266.070 SR, diubah menjadi 127.864 SR. Selain itu, pembagian konkit untuk nelayan dan petani dipangkas menjadi 25.000 untuk nelayan dan 10.000 untuk petani. Demikian juga konversi mitan ke LPG 3 kg.

Punya Potensi Besar, **Investasi Migas Masih Menarik** di Tengah **Pandemi Covid-19**

Industri migas di tanah air tetap memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ditambah dengan stimulus dari Pemerintah, seperti dibukanya akses data, gairah investasi dapat ditumbuhkan di tengah pandemi Covid-19.

Seperti beberapa negara lainnya, sub sektor migas di Indonesia juga turut terdampak pandemi Covid-19. Saat ini, misalnya, banyak penawaran Wilayah Kerja (WK) migas yang ditunda. Selain pandemi Covid-19, rendahnya harga minyak mentah global juga menjadi alasan Pemerintah untuk menunda lelang WK migas.

Investasi US$117 miliar

Meski pandemi Covid-19 telah mempengaruhi industri migas tanah air, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap fokus menjaga investasi sektor ESDM dalam lima tahun mendatang. Sub sektor migas dinilai tetap punya peluang besar dalam menggaet investor dengan total nilai investasi sekitar US$117 miliar hingga tahun 2024.

"Kami perkirakan akan ada investasi senilai US$117 miliar yang masuk di hilir dan hulu migas dalam lima tahun mendatang," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Rabu (19/2).

Agung merinci, total investasi tersebut diperoleh secara bertahap di mulai dari tahun 2020 sebesar US$15 miliar, US$20 miliar di tahun 2021, kemudian berturut-turut pada tahun 2022 (US$25 miliar), 2023 (US$29 miliar), dan 2024 (US$28 miliar).

Optimisme penetapan target investasi migas, jelas Agung, mempertimbangkan realisasi tahun 2019 sebesar US$12,5 miliar yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, terutama di sektor hulu migas. Investasi hulu migas tercatat senilai US$11,49 miliar pada 2019 atau meningkat dibandingkan dengan capaian 2017 yang senilai US$10,27 miliar.

"Kami yakin target investasi tersebut cukup realistis mengingat akan berjalan beberapa proyek strategis migas serta masih adanya 128 cekungan berisi minyak dan gas yang akan beroperasi. Bahkan beberapa wilayah kerja migas yang sudah dieksploitasi lama masih punya potensi," tegas Agung.

Hal yang sama terjadi pada sektor hilir, peluang meningkatnya investasi didorong dari makin meluasnya sejumlah program pembangunan infrastruktur, seperti program Bahan Bakar Minyak (BBM) di 500 titik, 3,5 juta sambungan jaringan gas kota, pembagian konverter kit (konkit) BBM ke BBG untuk nelayan dan petani hingga pembangunan pipa transmisi gas.

"Kementerian ESDM akan terbuka kepada siapa saja yang serius menanamkan modalnya untuk membangun sektor ESDM lebih baik," lanjut Agung.

Sebagai catatan, investasi sektor ESDM tahun 2019 mencapai US$31,9 miliar atau 96% dari target US$33,4 miliar. Dari jumlah tersebut, investasi terbesar berasal dari sub sektor migas, yaitu US$12,5 miliar, disusul listrik sebesar US$12 miliar, minerba US$5,9 miliar, dan EBTKE sebesar US$1,5 miliar.

Sementara untuk tahun 2020, Pemerintah menargetkan investasi sektor ESDM sebesar US$35,9 miliar, terdiri dari investasi subsektor migas US$13,8 miliar, listrik US$12 miliar, minerba US$7,8 miliar, dan EBTKE US$2,3 miliar.

Demikian disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers terkait capaian sektor ESDM tahun 2019 dan program 2020 di Kementerian ESDM, Kamis (9/1). Pada kesempatan ini, Menteri ESDM didampingi para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.

Menteri Arifin memaparkan, ESDM merupakan sektor terbesar penyumbang PNBP nasional, terdiri dari PNBP migas, mineral dan batubara, EBTKE dan lainnya (DMO migas, pendapatan jasa pengembangan SDM, jasa pendidikan, dan BLU jasa litbang). Pada tahun 2019, PNBP sektor ESDM ditargetkan sebesar Rp214,3 triliun, di mana realisasinya mencapai Rp172,9 triliun atau 81%. Hal ini disebabkan asumsi ICP yang dalam APBN 2019 ditetapkan US$70 per barel (realisasinya US$62,37 per barel) serta asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS (realisasinya Rp14.102 per dolar AS). "Adapun target 2020 sebesar Rp181,7 triliun," tambah Arifin.

Realisasi subsidi energi pada tahun 2019 lebih terarah, yaitu sebesar Rp135,4 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi APBN Rp160,0 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, subsidi energi dianggarkan sebesar Rp125,3 triliun.

Terkait pelaksanaan anggaran Kementerian ESDM tahun 2019, sebagian besar digunakan belanja infrastruktur untuk rakyat. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 91,70% dari pagu total Rp5,17 triliun. Realisasi tahun 2019 merupakan realisasi terbesar selama 10 tahun terakhir.

Di samping itu, kinerja pengelolaan anggaran juga semakin baik ditandai dengan nilai SMART sebesar 87,35 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 73,60 dan capaian nilai IKPA sebesar 97,04, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 93,97. Laporan keuangan Kementerian ESDM juga mendapat predikat WTP dari BPK selama tiga tahun berturut-turut.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM juga memaparkan capaian dari pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang merupakan salah satu utilisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik agar dapat termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian.

"Dengan adanya jargas dapat mengurangi biaya rumah tangga sekitar Rp90.000 per bulan. Selain itu, lebih praktis dan ramah lingkungan dibandingkan BBM," katanya.

Pada tahun 2019, telah dibangun jargas sebanyak 74.496 Sambungan Rumah (SR) dan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 127.864 SR. Pemerintah akan terus mendorong Program Jargas ini hingga mencapai 30 juta SR pada tahun 2035.

Terkait implementasi mandatori penggunaan B20, telah dimulai sejak Januari 2016 dan telah berjalan dengan baik pada sektor PSO. Sejak 1 September 2018, Pemerintah memperluas mandatori B20 ke sektor Non PSO, seperti kelistrikan, pertambangan, perkeretaapian, industri, dan angkutan laut. Mandatori B20 selanjutnya ditingkatkan menjadi mandatori B30 pada Januari 2020.

Produksi biodiesel tahun 2019 ditargetkan 7,37 juta kiloliter (kl) dan realisasinya mencapai 8,37 juta kl. Pemanfaatan domestik sekitar 75% atau setara 6,26 juta kl sehingga menghemat devisa US$3,35 miliar atau Rp48,19 triliun. Tahun 2020, produksi biodiesel ditargetkan sebesar 10 juta kl.

Tetap menarik perhatian

Industri migas nyatanya masih menarik perhatian investor. Baru-baru ini, contohnya, Persatuan Emirat Arab (PEA) menandatangani 11 perjanjian bisnis dengan Indonesia, sebagian menyasar ke bisnis energi. Total estimasi nilai investasi yang diperoleh dari 11 hasil perjanjian tersebut mencapai Rp314,9 triliun atau US$22,89 miliar. Di samping 11 perjanjian bisnis, diteken pula lima perjanjian antara Pemerintah PEA dan Indonesia dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

"Saya sangat sambut baik, hari ini 16 perjanjian kerja sama dapat

Dengan adanya jargas dapat mengurangi biaya rumah tangga sekitar Rp90.000 per bulan. Selain itu, lebih praktis dan ramah lingkungan dibandingkan BBM."

Arifin Tasrif
Menteri ESDM

dilakukan," kata Presiden Joko Widodo usai pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Mohamed bin Zayed di Abu Dhabi, Senin (13/1) waktu setempat, seperti dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara.

Dari 16 perjanjian, Indonesia dan PEA menyepakati di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, ada 11 perjanjian bisnis yang diteken antar kedua negara meliputi bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset.

Salah satu dari kesepakatan bisnis yang akan dijalankan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Perusahaan energi baru terbarukan (EBT) Masdar, yang berbasis di Abu Dhabi, PEA, nantinya akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi) membangun PLTS Terapung Cirata sebesar 145 *megawatt peak* (mwp).

Investasi di pembangkit ini diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar *Power plant* sebesar 132,5 *megawatt* (mw).

Selain pengembangan energi baru terbarukan, ditandatangani pula kesepakatan bisnis sejumlah proyek migas seperti pengembangan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) RU V Balikpapan antara Pertamina dengan Mubadala, potensi minyak mentah di Balongan antara Pertamina dengan ADNOC, hingga penyediaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) antara ADNOC dengan Pertamina.

Pada subsektor mineral, ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam rangka penambahan produksi *ingot alloy* dan *billet*. Pada masa uji coba penambahan produksi, direncanakan sekitar produksi 20 ribu ton. Saat ini, kapasitas produksi normal mencapai 250 ribu ton.

Berikut rincian kerja sama bisnis antara PEA-Indonesia di sektor energi:

- LPG *Supply Contract* antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan Pertamina dengan nilai kontrak US$90-270 juta.
- RIPA (*Refinery Investment Principle Agreement*) antara Mubadala Investment Company dan Pertamina untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49% saham PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) - RDMP RU V dengan total potensi kerja sama senilai US$1,6 miliar.
- MoU antara ADNOC dan Pertamina tentang kerja sama pengembangan Project Crude to Petrochemical US$10,1 miliar.
- Penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA) untuk PLTS Terapung Cirata antara PT PJB dengan Masdar. Proyeksi nilai investasi US$129 juta.
- Adendum MoU antara Emirates Global Aluminium (EGA) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam rangka mengakomodir penetapan jangka waktu kerja sama. Proyek Peningkatan Kapasitas Tungku Peleburan termasuk transfer teknologinya dari 250 ktpa (kilo tonnes per annum) menjadi 300 ktpa, *Technical Exchange* di bidang *Reduction Technology* dan proyek Greenfield Aluminium *Smelter* di Kalimantan Utara berkapasitas 500-1.000 ktpa.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga aktif menjajaki kerja sama dengan negara-negara lain. Salah satunya kerja sama Indonesia-Norwegia.

"Kami mengundang perusahaan Norwegia untuk memulai lagi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Norwegia dapat mengulangi keberhasilan Statoil selama partisipasinya dalam mengeksplorasi migas Indonesia. Perusahaan Norwegia lainnya dapat mengambil kesempatan untuk bergabung dengan bisnis migas di Indonesia karena industrinya masih menarik," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial dalam acara *Production Enhancement and Asset Integrity* Seminar yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Norwegia di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Kamis (5/3).

Indonesia memiliki potensi migas yang cukup menjanjikan. Wilayah Kerja migas Indonesia mencapai 750.000 km persegi. Cadangan terbukti minyak Indonesia sebanyak 3,8 miliar barel dan gas 77 triliun *standar cubic feet* (tsc). Produksi migas Indonesia mencapai puncaknya pada 1977 dan 1995. Setelah tahun 1995, produksi minyak mulai menurun. Sebaliknya, produksi gas meningkat. Ditargetkan pada tahun ini, produksi minyak mencapai 755.000 barel per hari, sedangkan produksi gas sebesar 6.6670 mmscfd.

"Sudah menjadi tugas kita, baik Pemerintah maupun perusahaan minyak untuk mencapai target produksi. Kami percaya, banyak dari kita yang akan bekerja keras mempertahankan produksi," katanya.

Diakui Ego, Indonesia mengalami sejumlah tantangan untuk mencapai target produksi antara lain fasilitas atau teknologi yang digunakan termasuk lama. Selain

itu, pergeseran paradigma dari transformasi analog ke digital.

"Lebih dari 69% lahan produksi di Indonesia telah berusia lebih dari 30 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 31% berusia di bawah 30 tahun," papar Ego.

Untuk meningkatkan produksi migas, Indonesia melaksanakan berbagai strategi, seperti mempertahankan tingkat produksi saat ini dengan mengubah sumber daya menjadi produksi, mempercepat EOR serta meningkatkan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru.

"Norwegia yang merupakan salah satu negara sahabat, dikenal dengan inovasi teknologinya. Industri migas Indonesia harus mencari informasi terbaru mengenai hal ini," tegas Ego.

Director for Innovation Norway Fredrik Bjerke Abdelmaguid dalam kesempatan itu mengungkapkan, migas merupakan salah satu industri terpenting Norwegia selama lebih dari 40 tahun dan masih akan bertahan hingga beberapa dekade mendatang. Saat ini, Norwegia merupakan produsen minyak ke-8 di dunia serta produsen gas ke-3 di dunia.

"Sektor migas merupakan sekitar 18% dari PDB Norwegia dan lebih dari setengahnya diekspor. Sektor ini menopang perekonomian negara," kata Fredrik.

Selain ekspor migas, lanjut dia, Norwegia juga terkenal dengan industri penunjang. Industri ini telah mengembangkan teknologi mutakhir di berbagai bidang.

Dalam kesempatan tersebut, Fredrik juga menegaskan bahwa negaranya selalu bersikap terbuka, di mana kerja sama dengan negara lain merupakan suatu hal yang penting.

"Kerja sama dengan Indonesia sangat menonjol. Kedua negara memiliki hubungan yang kuat dan berkembang di berbagai sektor, termasuk energi," tambahnya.

Fredrik mengatakan, International Energy Agency memperkirakan permintaan energi nasional akan meningkat 27% pada tahun 2040. Meski energi baru terbarukan akan berkembang, namun migas akan tetap dibutuhkan.

Dalam tahun-tahun mendatang, industri migas akan memfokuskan diri pada peningkatan produksi dari lapangan yang ada. Khusus di Norwegia, rata-rata tingkat pemulihan minyak di ladang migas mencapai 47%.

"Untuk meningkatkan hal ini, teknologi baru jelas akan memainkan peran besar," ucapnya.

Norwegia merupakan salah satu negara yang maju dalam pengembangan teknologi migas. Oleh karena itu, Fredrik menawarkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di negaranya.

"Industri migas Indonesia akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Saya berharap bahwa perusahaan Norwegia akan menjadi bagian dari pengembangan ini," harap Fredrik.

Tak hanya di hulu, investasi di hilir migas Indonesia juga memiliki potensi besar. Untuk tahun 2020, Pemerintah memproyeksikan investasi hilir migas mencapai US$3.223,39 juta. Investasi hilir migas tahun 2020 didominasi oleh kegiatan pengolahan, yaitu peningkatan kapasitas kilang (RDMP) dan pembangunan kilang baru (GRR) yang mencapai 80%. Selanjutnya adalah investasi di bidang pengangkutan sebesar 14%, penyimpanan 4%, dan niaga 2%.

Untuk tahun 2021, investasi hilir migas diproyeksikan sebesar US$7.238,90 juta. Tahun 2022 mencapai US$11.819,90 juta. Selanjutnya, US$14.531,83 juta pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai US$13.923,36 juta.

Secara umum, berdasarkan *Global Competitivenes Index* 2017-2018, investasi migas Indonesia berada di posisi 36 dari 137 negara. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi, termasuk di bidang migas. Faktor utama iklim bisnis adalah birokrasi Pemerintah, stabilitas politik, regulasi perpajakan, dan produktivitas tenaga kerja. ●

Gasifikasi Gas Batu Bara untuk Tekan Impor LPG

Program gasifikasi batubara atau *coal to Dimethyl Ether* (DME) akan terus didorong oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan nilai tambah batubara. Bahkan, program DME ini telah dimasukkan sebagai prioritas utama investasi minerba dalam lima tahun ke depan guna menggenjot *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

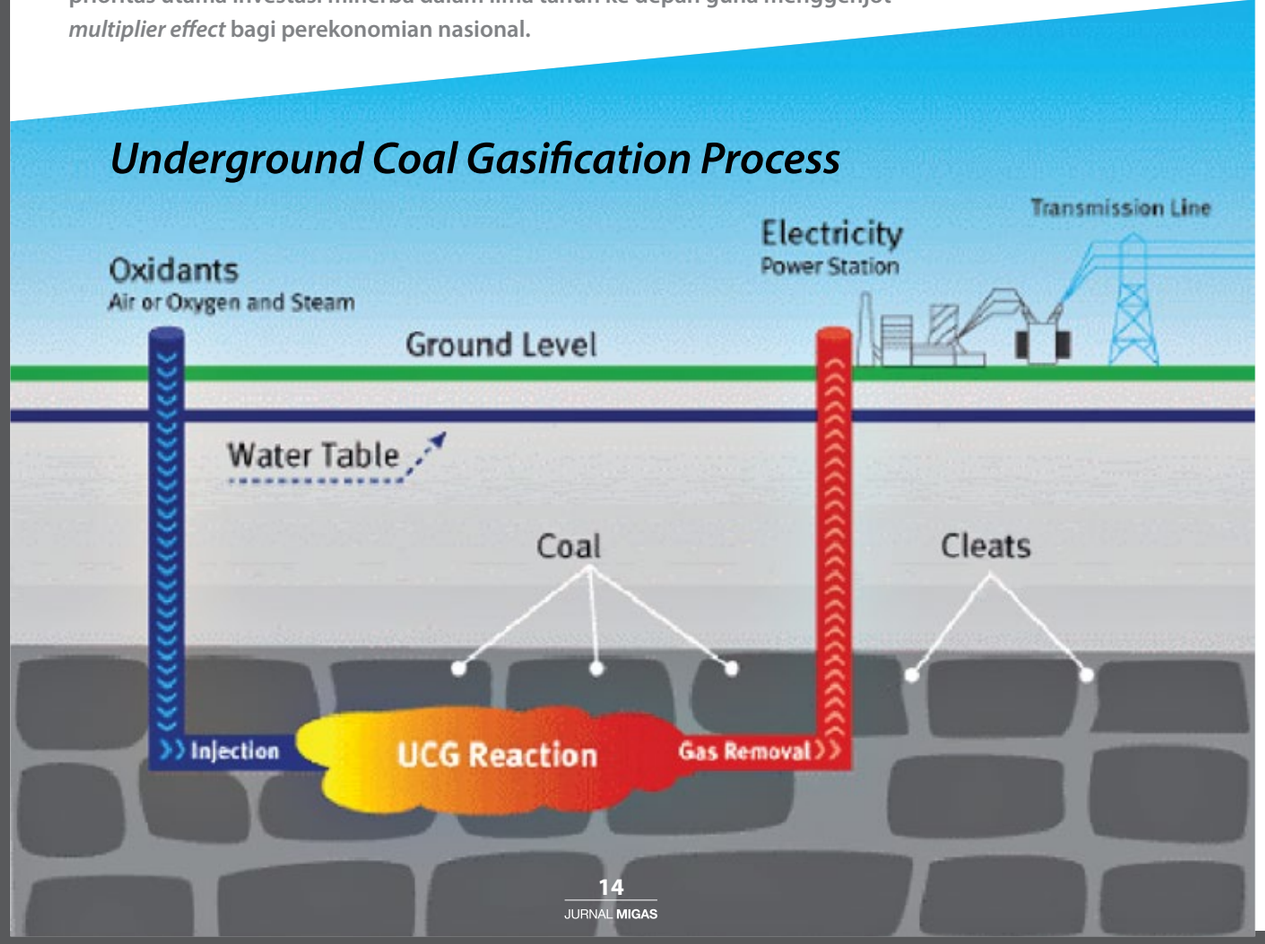

"Program DME ini bisa meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Katadata Indonesia *Data and Economic Conference* (IDE) 2020 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).

Terhitung hingga tiga tahun ke depan, jelas Arifin, Pemerintah tengah menyiapkan kajian finansial, teknis dan non-teknis, pedoman pemanfaatan serta regulasi pengusahaan gasifikasi batubara. "Kami memfokuskan pada pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama," tegasnya.

Saat ini, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

Di samping itu, Pemerintah tengah membuka peluang untuk memberikan insentif pengurangan royalti batubara. "Kami juga sedang menyiapkan insentif untuk program DME ini, baik kebijakan harga batubara-nya maupun penyesuaian royalti batubara," kata Arifin.

Adapun, salah satu proyek gasifikasi batubara saat ini tengah dikerjasamakan oleh Pertamina dan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim & Air Products. Proyek ini dinilai sudah cukup ekonomis lantaran PTBA akan memasok batu bara dengan kalori rendah dengan harga terjangkau.

"Pada tahun 2023 proyek Coal to DME kerjasama Bukit Asam dan Pertamina diharapkan dapat memproduksi 1,4 Juta Ton DME yang dapat mensubtitusi LPG," jelas Arifin.

Nantinya, konsumsi batu bara yang dibutuhkan PTBA sebanyak 8 juta ton per tahun dengan GAR 4.000 kcal/kg untuk hasilkan 1,4 juta DME, 300 ribu *Methanol* dan 4,25 juta ton MEG.

Salah satu dukungan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan memberikan harga khusus bahan baku gasifikasi di kisaran USD20 - 21 per ton. "Sudah (ditetapkan) kalau bisa di bawah lagi. Kita dorong proyek yang memang memanfaatkan batubara untuk hilirisasi," ungkap Arifin.

Arifin melanjutkan, penetapan harga batubara khusus untuk hilirisasi sebagai bahan baku LPG tidak memerlukan payung hukum. "Kayaknya tidak perlu pakai Permen (Peraturan Menteri), B to B (*business to business*) saja, tapi kita yang minta supaya bisa masuk keekonomian," Arifin menegaskan.

Tahap pengerjaan fisik sendiri baru bisa dimulai pada 2023 hingga 2024. Dalam prosesnya, batubara dihilirisasi menjadi syngas yang bisa diubah langsung menjadi *Methanol Ethylene Glycol* (MEG) dengan kapasitas produksi 250 ribu ton per annum.

Selain itu, syngas juga bisa diolah kembali dan menghasilkan Methanol sebanyak 300 ribu ton per annum, selanjutnya *Methanol* masih bisa diolah kembali untuk menjadi DME dengan total produksi pada tahun 2024 mencapai 1,4 juta ton per annum.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan program-program yang dapat mendorong industri subtitusi *liquified petroleum gas* (LPG) di Indonesia.

Hal yang dilakukan, salah satunya adalah menetapkan harga batubara khusus sebagai bahan baku gasifikasi sebesar Rp 272.742 hingga Rp 286.379 per ton.

Ini merupakan langkah pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi batubara menjadi *dimethyl ether* (DME).

Dimethyl ether (DME) merupakan bahan baku pengganti LPG guna menekan impor.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, program gasifikasi batubara ke DME akan terus didorong pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai tambah batubara juga untuk mengurangi impor LPG.

Program ini telah dimasukan kedalam prioritas utama investasi mineral dan batu-bara dalam lima tahun kedepan.

Hal ini sengaja dilakukan dilakukan guna terus mendorong *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

"Program DME ini bisa meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers Nomor 055.Pers/04/SJI/2020 per tanggal 1 Februari 2020.

Dalam rangka penunjang program tersebut, pemerintah telah menyiapkan kajian finansial, teknis dan non-teknis dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Tak hanya pihak pemerintahan, program ini pun didukung oleh para pengusaha swasta yang tergabung dalam Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Hingga saat ini, proyek dengan swasta ini merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh Pertamina dan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim dan Air Product.

Pemerintah memfokuskan industri gasifikasi batu bara *coal to Dimethyl Ether* (DME) untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas dan meningkatkan nilai baru bara, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Pemerintah, menurut Menteri Tasrif, menyiapkan kajian finansial, teknis dan non-teknis, pedoman pemanfaatan serta regulasi pengusahaan gasifikasi batubara.

"Kami memfokuskan pada pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama," ujar dia dalam siaran pers, Senin.

Program DME ini telah dimasukkan sebagai prioritas utama investasi

> **Program DME ini bisa meningkatkan nilai tambah batubara serta mengurangi impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG),"**
>
> **Arifin Tasrif**
> *Menteri ESDM*

minerba dalam lima tahun ke depan guna menggenjot *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Meski bisa memproduksi gas alam hingga mencapai 1,2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), Indonesia masih mengimpor LPG dalam jumlah yang cukup besar.

Sebenarnya, jika produksi gas tersebut bisa dikonversi menjadi LPG sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Namun karakteristik gas yang diproduksi oleh Indonesia tidak serta merta dapat dikonversi menjadi LPG karena merupakan jenis gas kering (*lean* gas) dengan komponen C3-C4 tipis.

Menurut pemerintah, dalam satu tahun, impor LPG mencapai USD3 miliar atau setara Rp5 triliun.

Saat ini, ada delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

Pemerintah juga membuka peluang insentif pengurangan royalti batu bara.

Salah satu proyek gasifikasi batu bara saat ini tengah dikerjasamakan oleh Pertamina dan PT Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim & Air Products.

Proyek ini dinilai sudah cukup ekonomis lantaran PT Bukit Asam akan memasok batu bara dengan kalori rendah dengan harga terjangkau.

Pada 2023 proyek ini bisa memproduksi 1,4 Juta ton DME yang dapat menyubstitusi LPG.

Nantinya, konsumsi batu bara yang dibutuhkan PT Bukit Asam sebanyak 8 juta ton per tahun dengan GAR 4.000 kcal/kg.

Jumlah ini bisa menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu sebanyak 1,4 juta DME, 300 ribu *methanol* dan 4,25 juta ton *methanol ethylene glycol* (MEG).

Dalam prosesnya, batubara dihilirisasi menjadi syngas (*synthetic gas*) yang bisa diubah langsung menjadi MEG dengan kapasitas produksi 250 ribu ton per annum.

Selain itu, syngas juga bisa diolah kembali dan menghasilkan *Methanol* sebanyak 300 ribu ton per annum.

Selanjutnya *methanol* masih bisa diolah kembali untuk menjadi DME dengan total produksi pada 2024 mencapai 1,4 juta ton per annum.

Salah satu dukungan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan harga khusus bahan baku gasifikasi pada kisaran USD20 - 21 per ton, ujar Menteri Tasrif.

Foto Ilustrasi Gasifikasi

PT Pertamina (Persero) menyampaikan akan membangun 4 pabrik DME (Dimetil Eter). Pembangunan dilakukan untuk proses gasifikasi batu bara yang dicanangkan sebagai pengganti impor Elpiji (LPG/*Liquified Petrolium Gas*).

Langkah Pertamina itu didasari oleh ketergantungan Indonesia yang tinggi atas LPG. Di tengah ketergantungan tersebut, Indonesia memenuhi 70 persen kebutuhan LPG nasional atau 5 juta metric ton per tahun dari impor.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut bahwa pembangunan 4 pabrik tersebut bakal memenuhi kebutuhan impor LPG sekitar 5 juta metric ton.

"Karena masih impor 5 juta (metric ton), maka memerlukan sekitar 4 lokasi yang harus kami bangun. Kalau kapasitas per lokasinya adalah 1,4 juta metric ton, maka kami akan 4, mungkin ke depannya kalau tumbuh jadi 5," kata Nicke saat rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (25/2).

Nicke mengatakan pembangunan 4 pabrik tersebut nantinya diharapkan bisa menyerap batu bara kalori rendah yang kini tak terpakai lantaran PT PLN (Persero) sudah tidak menggunakannya lagi.

"Sebelumnya kan digunakan untuk pembangkit listrik, namun sekarang pemerintah sudah ada kebijakan, jadi karena memang tidak dapat digunakan sebagai apa-apa, ini kami proses di *coal gasification* (gasifikasi batu bara)," jelasnya.

Nantinya, lanjut Nicke, batubara kalori rendah akan diproses menjadi sin gas, yang berujung pada produksi DME. Nicke berharap DME yang telah diproduksi dapat dijadikan subtitusi impor LPG.

"Ini rencana besar Pertamina dalam konteks meningkatkan *new and renewable energy* di dalam bauran energi nasional," tuturnya.

Berdasarkan perhitungan Pertamina, produk akhir dapat dibuat dengan harga yang relatif rendah, yakni di kisaran US$20 dolar per metric ton. Nicke mengklaim Pertamina sudah melakukan produksi percobaan dengan PTBA dengan menggunakan teknologi dari Air Product asal Amerika.

"Kami nanti dapat memproses 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 metric ton DME, teknologi kami dengan PTBA gunakan Air Product Amerika," pungkasnya.

Nicke menyebut Pertamina bakal menggelontorkan nilai investasi sekitar US$2,5 miliar untuk melakukan upaya gasifikasi tersebut.

"Itu dari hulu ke hilir, kenapa ? karena kami prosesnya mulai dari batubara, diproses gasifikasi jadi sin gas, itu juga diubah DME dan juga *methanol*. Jadi itu US$2,5 miliar itu sudah sampai total investasi," tuturnya.

Begini Proses Pengubahan Batubara Menjadi Gas

Gasifikasi yakni sebuah proses kimiawi yang mengubah bahan bakar berbentuk padat menjadi senyawa gas, melalui reaksi dengan sejumlah campuran beberapa zat. Beberapa waktu lalu, PT Pertamina Persero menjajaki kerjasama bersama PT Bukit Asam Tbk, untuk menciptakan sebuah bahan bakar baru yang berasal dari proses gasifikasi batubara. Lalu seperti apa mekanismenya?

1 Proses Gasifikasi Batubara

Pada dasarnya, proses dalam gasifikasi batubara yakni dengan mengkonversi batubara yang berbentuk padatan menjadi sebuah gas yang bernilai bakar, dengan memanfaatkan reaksi oksidasi dengan udara. Proses konversi ini dilakukan pada reaktor yang kemudian diberi nama *gasifier*. Nantinya, hasil dari gasifikasi batubara ini bisa dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar atau bahan kimia lainnya.

2 Teknik Gasifikasi Batubara

Ada sejumlah teknik yang dipakai dalam proses gasifikasi ini yakni di antaranya adalah :

- *Entrained Bed Gasification* - Proses konversi batubara menjadi gas yang menggunakan teknik semburan
- *Fixed Bed Gasification* - Proses konversi batubara menjadi gas yang menggunakan teknik aliran unggun diam
- *Fluidized Bed Gasification* - Proses konversi batubara menjadi gas yang menggunakan teknik fluida cair

Diketahui dari sejumlah praktek uji yang dilakukan, teknik *Fixed Bed Gasification* adalah teknik yang paling sedikit membutuhkan biaya dan prosesnya pun cukup sederhana.

3 Tahapan Proses Gasifikas

Dalam menjalankan proses gasifikasi batubara, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan selama proses. Tahapan-tahapan itu meliputi, proses pengeringan, devolatilisasi, oksidasi dan terakhir proses reduksi.

Tahapan pengeringan perlu dilakukan untuk menghilangkan kandungan air yang ada pada sebuah batubara. Selanjutnya batubara yang sudah dikeringkan akan dilakukan devolatilisasi dengan cara dipanaskan hingga batubara akan mengalami dekomposisi menjadi arang, gas dan tar.

Kemudian batubara yang sudah mengalami dekomposisi itu akan melewati proses oksidasi, yakni hasil dari devolatilisasi dipanaskan kembali hingga batubara yang sudah berbentuk arang akan melepaskan sejumlah molekul, untuk kemudian sisa dari arang itu akan direduksi menjadi gas untuk dijadikan bahan bakar. ●

Penurunan Harga Gas

untuk Industri Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memutuskan harga gas bumi diturunkan menjadi rata-rata US$6 per *million British thermal unit* (mmbtu) di *plant gate* konsumen mulai 1 April 2020. Penurunan harga gas untuk industri tersebut tidak akan mengurangi besaran penerimaan kontraktor kontrak kerja sama migas (KKKS).

Demikian hasil keputusan rapat terbatas melalui *video conference* yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu, (18/3).

"Rencana penurunan harga gas menjadi US$6 (per mmbtu) mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2016. Untuk bisa menyesuaikan harga US$6 per mmbtu tersebut, maka harga gas di hulu harus bisa diturunkan antara US$4-4,5 per mmbtu dan biaya transportasi serta distribusi bisa diturunkan antara US$1-1,5 per mmbtu," ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif pasca rapat terbatas tersebut.

Penurunan harga gas ini juga diterapkan untuk sektor kelistrikan dalam rangka menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri. Penurunan harga gas untuk industri, termasuk pupuk dan PLN, tidak menambah beban keuangan negara.

Mengakibatkan konsekuensi

Dengan keputusan tersebut, Pemerintah mengakui akan terdapat pengurangan penerimaan di hulu migas. Namun demikian, ada tambahan pendapatan Pemerintah dari pajak dan deviden, penghematan subsidi listrik, pupuk dan kompensasi PLN serta terdapat penghematan karena konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas.

"Tentu saja konsekuensinya di bidang hulu gas. Penerimaan Pemerintah bisa berkurang. Tapi, ini bisa dikompensasi dengan pengurangan biaya subsidi dan (pengurangan) biaya kompensasi (PLN), kontribusi dari peningkatan pajak, dan deviden. Juga terdapat penghematan dari konversi bahan bakar pembangkit listrik dari diesel ke gas," ungkap Menteri Arifin.

Penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas, tambahan pasokan gas, dan efisiensi perusahaan.

"Terkait dengan biaya transportasi gas, kami juga telah melakukan pembahasan dengan *transporter* gas utama. Jadi, investasi yang sudah 10-12 tahun beroperasi memiliki nilai depresiasi yang bisa dipertimbangkan dan melakukan efisiensi di perusahaan sendiri dengan kontribusi yang signifikan. Kami juga mengupayakan agar kebutuhan aliran gas (alokasi gas) untuk bisa memenuhi kapasitas pipanya kita siapkan. Kami mengimbau agar *transporter* gas bisa membuka akses kepada *supplier* gas yang lain supaya volumenya juga bisa dioptimalkan lebih banyak lagi," tambahnya.

Penurunan harga gas ini diyakini mendorong terciptanya *multiplier effects* dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, meningkatkan daya saing industri untuk ekspor dan substitusi impor serta menjaga keberlangsungan industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional. Penurunan harga gas industri tersebut juga bakal mengatrol produktivitas dan utilitas sektor manufaktur di dalam negeri.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial mengungkapkan, dengan harga gas industri sebesar US$6 mmbtu ini akan membuat industri akan lebih kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada awal rapat terbatas, Rabu (18/3), mengingatkan agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan juga dievaluasi. Hal ini agar pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi serta nilai tambah bagi perekonomian negara.

"Industri yang diberi insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya, meningkatkan investasi barunya. Industri yang diberi insentif juga mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya sehingga produknya menjadi lebih kompetitif. Industri yang diberi insentif juga harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," demikian kata Presiden sebagaimana dilansir *website* resmi Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, lanjut Presiden, dirinya meminta agar dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap industri-industri yang diberikan insentif.

"Harus ada disinsentif, harus ada *punishment* sehingga industri memiliki *performance* sesuai yang kita inginkan," tegasnya.

Sambutan positif

Penurunan harga gas industri mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, mendukung Menteri ESDM melakukan penurunan harga gas untuk industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyesuaian harga di hulu dengan pengurangan porsi Pemerintah.

Penurunan harga gas ini juga mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres No. 40 Tahun 2016 serta BUMN yang menerima subsidi dan kompensasi gas dan dengan margin yang wajar untuk menjaga kelangsungan usaha BUMN dan badan usaha hilir lainnya.

Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja secara virtual Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Komisi VII DPR, Senin (4/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam paparannya mengatakan, Perpres No. 40 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk melakukan penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari KKKS dan menetapkan tarif penyaluran gas bumi. Selanjutnya, rapat terbatas tanggal 18 Maret 2020 yang dihadiri juga oleh badan usaha, disepakati untuk dilaksanakan penurunan harga gas untuk industri dan harga gas listrik.

Penyesuaian harga dilakukan dengan mekanisme penurunan harga gas hulu

menjadi US$4,0-4,5 per mmbtu melalui pengurangan porsi Pemerintah dan melakukan efisiensi biaya penyaluran menjadi US$1,5-2,0 per mmbtu sehingga harga gas di *plant gate* menjadi US$6,0 per mmbtu.

"Kita berharap harga energi yang murah ini menjadi daya tarik untuk meningkatkan kemampuan daya tarik investasi untuk industri. Makin banyak investasi di sisi hilirnya, makin banyak menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Makin berkembangnya industri menggunakan gas akan mendorong sektor hulu migas," ujar Arifin.

Dengan penyesuaian harga gas untuk industri ini, terjadi penurunan pendapatan negara mulai 2020 hingga 2024 sebesar Rp121,78 triliun. Namun, penurunan ini di-*balance* dengan penghematan sebesar Rp125,03 triliun yang berasal dari konversi pembangkit diesel (kelistrikan) Rp13,07 triliun, penurunan kompensasi kelistrikan Rp74,25 triliun, pajak dan dividen dari industri dan pajak sebesar Rp7,5 triliun, dan Rp30,21 triliun dari penurunan subsidi pupuk dan kelistrikan.

Dengan demikian, Pemerintah masih memperoleh keuntungan Rp3,25 triliun. Belum termasuk dampak *multiplier effects* dari penurunan harga gas di sektor industri, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri.

"Dalam lima tahun, yaitu 2020 sampai 2024, Pemerintah akan bisa memiliki kelebihan Rp3,25 triliun. Kehilangan pendapatan Pemerintah tiap tahun bisa di-*balance* dengan penghematan subsidi dan kompensasi listrik dan penghematan dari konversi listrik ke gas juga. Ini sudah dibahas dengan instansi terkait termasuk Kemenkeu," tegas Arifin.

Seiring berjalannya waktu, volume gas sebesar 330 *billion British thermal units per day* (bbtud) ditandatangani dalam 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi oleh empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor Industri melalui pemilik fasilitas pipa.

Jumlah ini berkisar 28% dari total volume sebesar 1.188 bbtud yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 89K/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K tahun 2020.

Melalui kedua beleid ini, Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi di titik serah pengguna gas bumi dengan harga US$ 6/mmbtu. Penetapan ini diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri yang terdiri atas industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 ini juga diatur kriteria industri yang mendapat gas tertentu. Industri yang selama ini mendapat harga tinggi diturunkan menuju atau mendekati US$6 tergantung seberapa besar kemampuan penyesuaian harga hulu dan biaya transportasinya. Tapi, industri yang sudah mendapat harga di bawah US$6 tetap berlaku dan tidak harus naik.

Meski baru 28%, sejumlah pelaku industri mengaku bahwa pemberlakuan harga gas industri di level US$6 per mmbtu sebagai angin segar di tengah dampak pandemi Covid-19.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono.

Menurutnya, penurunan harga gas industri sangat membantu dalam kelangsungan industri petrokimia, di mana harga gas ini akan menurunkan harga jual produk sekitar US$2 per ton sehingga mampu bersaing terhadap produk impor, terutama dari luar Asean.

"Saat ini, ada beberapa komoditas yang sudah *over supply* yang diakibatkan oleh penambahan kapasitas atau investasi baru dan juga pelemahan permintaan dalam negeri sehingga dengan penurunan (harga gas) ini akan memperkuat daya saing untuk ekspor," tutur Fajar.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen *Synthetic Fiber* Indonesia (APSyFI) Bonar Sirait menyampaikan, pihaknya menyambut gembira serta berterima kasih atas terbitnya kebijakan penurunan harga gas yang sudah sangat lama ditunggu. Ini menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat dan akan membuat sektor industri dapat bersaing lebih baik lagi.

"Apalagi, dalam keadaan sekarang ini di tengah pandemi Covid-19, di mana terjadi kondisi yang luar biasa dan *force majeure* bagi seluruh industri. Kebijakan turunnya harga gas akan membuat industri dapat napas baru," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, terbitnya kebijakan penurunan harga gas industri akan diapresiasi setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih banyak dari sektor industri pengguna gas bumi. Sebab, daya saing mereka sangat bergantung pada keekonomian energi gas bumi.

Yustinus menjelaskan, di industri manufaktur ada *tangible* asset dan *intangible asset*, yang merupakan akumulasi usaha dan konsistensi yang didukung oleh kebijakan Pemerintah.

"Kami yakin sektor industri manufaktur pengguna gas bumi bisa bangkit dan berkontribusi lebih banyak pada perekonomian nasional, bahkan semakin kuat untuk re-industrialisasi, dengan memasok kebutuhan domestik dan ekspor," tandasnya. ●

> **Kita berharap harga energi yang murah ini menjadi daya tarik untuk meningkatkan kemampuan daya tarik investasi untuk industri.**
>
> **Arifin Tasrif**
> *Menteri ESDM*

Total Volume Penyesuaian Harga Gas Capai 1.223,03 BBTUD

Hingga saat ini, total volume gas bumi yang telah mengalami penyesuaian harga, baik untuk industri tertentu maupun untuk kelistrikan mencapai 1.223,03 BBTUD. Rinciannya, implementasi penyesuaian harga gas untuk industri tertentu telah dilakukan untuk volume sekitar 822,3 BBTUD. Jumlah tersebut terdiri dari 300 BBTUD sesuai Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) saat ini dan 476 BBTUD sesuai LoA yang telah ditandatangani, serta 46,3 BBTUD sesuai LoA yang ditandatangani pada Jumat (26/6). Sementara untuk kelistrikan telah diimplementasikan untuk 400,73 BBTUD gas bumi, terdiri dari 102 BBTUD sesuai PJBG saat ini, 85 BBTUD sesuai LoA yang telah ditandatangani dan 213,73 BBTUD sesuai LoA yang ditandatangani.

Hingga saat ini, total telah ditandatangani 25 LoA antara Penjual dan Pembeli sebagai implementasi Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 (termasuk 2 LoA yang ditandatangani hari ini) dengan total volume sebesar 522,3 BBTUD atau 43,3% dari total volume gas tahun 2020 dalam Kepmen 89K/2020.

Selain pasokan gas sebagai implementasi Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 yang telah ditandatangani perjanjiannya, terdapat pasokan gas sebesar 300 BBTUD atau setara 24,9% yang tidak memerlukan penandatanganan perjanjian antara penjual dan pembeli karena telah sesuai dengan kondisi saat ini. Secara total pasokan gas sebesar 822,3 BBTUD atau setara 68,2% sebagai pelaksanaan Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 telah diselesaikan.

Saat ini telah ditandatangani juga total 13 LoA antara Penjual dan Pembeli pada sektor kelistrikan (termasuk 11 LoA yang ditandatangani hari ini) dengan total volume gas sebesar 298,73 BBTUD atau setara 21,4% dari total volume gas tahun 2020 dalam Kepmen ESDM Nomor 91K/2020. Selain itu terdapat pasokan gas sebesar 102 BBTUD yang tidak memerlukan penyesuaian perjanjian dalam implementasi Kepmen ESDM Nomor 91K/2020. Secara total 28,7% volume gas untuk sektor kelistrikan tahun 2020 ini telah diselesaikan perjanjian yang dibutuhkan antara Penjual dan Pembeli untuk melaksanakan Kepmen ESDM Nomor 91K/2020.

Satu Dekade 400.269 SR, Pembangunan Jargas Terus Berlanjut

Dengan menggunakan dana APBN, Pemerintah Indonesia telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sejak tahun 2009 hingga saat ini. Selama satu dekade (2009-2019), telah terbangun sebanyak 400.269 sambungan rumah (SR).

Jargas yang telah terbangun tersebut tersebar di 17 provinsi. Perinciannya adalah Provinsi Aceh sebanyak 14.415 SR, Sumatera Utara 11.216 SR, Provinsi Jambi 6.000 SR, Riau 11.793 SR, Kepulauan Riau 4.001 SR, Sumatera Selatan 81.392 SR, Lampung 10.321 SR, Banten 9.109 SR, DKI Jakarta 12.660 SR, Jawa Barat 59.116 SR, Jawa Tengah 8.000 SR, Sulawesi Selatan 6.172 SR, Papua Barat 3.898 SR, Sulawesi Tengah 4.000 SR, Jawa Timur 85.961 SR, Kalimantan Timur 39.574 SR, dan Kalimantan Utara 32.361 SR.

Khusus untuk tahun 2019, jargas dibangun di 16 kabupaten/kota sebanyak 74.496 SR. Keenam belas kabupaten/kota itu ialah Kabupaten Aceh Utara 4.557 SR, Kota Dumai 4.743 SR, Kabupaten Karawang 6.952 SR, Kabupaten Cirebon 6.105 SR, Kota Depok 6.230 SR, Kota Bekasi 6.720 SR, Kota Jambi 2.000 SR, Kota Palembang 6.034 SR, Kabupaten Lamongan 4.000 SR, Kabupaten Kutai Kartanegara 5.000 SR, Kabupaten Pasuruan 4.100 SR, Kabupaten Probolinggo 4.055 SR, Kota Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Banggai 4.000 SR, dan Kabupaten Wajo 2.000 SR.

Dibangun di daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas, pembangunan jargas merupakan program strategis nasional. Pembangunan jargas berarti memanfaatkan gas bumi sebagai modal pembangunan dan sekaligus penyediaan energi bersih serta murah untuk masyarakat.

Dalam pencapaian 10 tahun program jargas ini, Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, melainkan juga menetapkan regulasi sebagai payung pemanfaatan aset yang berkaitan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun pemda kabupaten/kota, yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Rencananya naik lebih dari tiga kali lipat

Tahun 2020, awalnya Pemerintah akan membangun 266.070 SR di 49 lokasi. Ini berarti naik lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun 2019. Agar pembangunan berjalan lancar, Pemerintah meminta dukungan semua pihak terkait, termasuk juga pemerintah daerah.

Lelang pembangunan jargas telah mulai dilakukan sejak akhir 2019. Selain melakukan lelang, Pemerintah juga membentuk *Project Management Officer* (PMO) yang terdiri dari perwakilan Direktorat Pembangunan Infrastruktur Migas, badan usaha, juga Unit Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (UP3I). Nantinya, PMO ini akan membantu pengawasan pekerjaan di lapangan.

Sayangnya, pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai pembangunan infrastruktur migas, termasuk jargas di Indonesia. Akibatnya, Kementerian ESDM memutuskan menjadwal ulang pembangunan jargas tahun 2020 sebanyak 138.206 SR ke tahun 2021. Anggaran pembangunan jargas tersebut akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Semula, Pemerintah dengan dana sekitar Rp3,02 triliun, berencana membangun jargas sebanyak 266.070 SR di 49 kabupaten/kota. Namun, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait *refocusing* anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, maka tahun ini hanya akan dibangun 127.864 SR di 23 kabupaten/kota atau senilai Rp1,3 triliun.

Untuk tahun anggaran 2020, telah dilakukan penandatanganan tujuh paket kontrak pembangunan jargas tahap 1 tahun anggaran 2020 bertempat di Ruang Strategis, Gedung Ibnu Sutowo, Selasa (10/3). Kontrak senilai Rp862.391.761.743,06 ini untuk membangun 82.157 SR di 15 kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial mengapresiasi penandatanganan kontrak pembangunan jargas yang terbilang cepat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap kementerian/lembaga mempercepat belanja modal proyek-proyek infrastruktur.

“Ini memang arahan Presiden agar seluruh belanja modal proyek-proyek infrastruktur kalau bisa dimulai secepat mungkin. Jadi syukur *alhamdulillah*, awal Maret ini kita sudah menandatangani kontrak pembangunan tujuh paket,” katanya.

Ego mengharapkan agar para pelaksana pembangunan jargas serta Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) melaksanakan pekerjaan ini secara tepat waktu dan berkualitas. Dia mencontohkan hasil pembangunan jargas tahun 2019 yang menjadikan Kementerian ESDM mampu merealisasikan anggaran sebesar 92%.

“Pekerjaan jargas kita tahun 2019 ini paling baik pelaksanaannya sehingga dalam waktu 15 tahun terakhir ini, Kementerian ESDM

bisa merealisasikan anggarannya sebesar 92%. Bukan hanya realisasi (anggaran), tapi juga kualitas dari pelaksanaan anggaran Kementerian ESDM ini di atas rata-rata nasional," kata Ego.

Paket pembangunan jargas yang ditandatangani adalah:

1. Pembangunan jargas di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang sebanyak 13.358 SR dengan nilai kontrak Rp110.221.865.585,41.
2. Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kabupaten Muara Enim sebanyak 13.044 SR, dengan nilai kontrak Rp202.513.237.474,46.
3. Pembangunan jargas di Kota Dumai dan kota Pekanbaru sebanyak 9.981 SR dengan kontrak senilai Rp87.601.862.030,81.
4. Pembangunan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Serang sebanyak 13.114 SR dengan nilai kontrak Rp114.944.171.663,50.
5. Pembangunan jargas di Kota Semarang dan Kabupaten Blora sebanyak 10.725 SR senilai Rp87.042.024.905,20.
6. Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sebanyak 9.003 SR dengan nilai kontrak Rp91.350.223.554,72.
7. Pembangunan jargas di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambil, dan Kabupaten Sarolangun sebanyak 12.932 SR senilai Rp168.718.376.528,96.

Kemudian, pada Jumat (3/4), dilakukan penandatanganan dua paket kontrak senilai Rp 309.102.294.383,05 untuk membangun 33.518 SR jargas tahun anggaran 2020 di enam kabupaten/kota.

Paket yang ditandatangani secara *offline* dan *online* ini yaitu:

1. Pembangunan jargas di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 16.709 SR. Nilai kontrak Rp156.322.565.458,70.
2. Pembangunan jargas di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Tarakan sebanyak 16.809 SR. Nilai kontrak Rp152.779.728.924,35.

Memerlukan sinergi banyak pihak

Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak sehingga tujuan gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, dapat terwujud.

Kementerian ESDM dalam hal ini telah berkoordinasi dengan BUMN dan pemerintah daerah. Salah satunya, sebagai contoh, dengan Pemerintah Kota Palembang yang berkomitmen penuh mendukung pembangunan jargas. Untuk penyediaan pasokan gas bumi, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan SKK Migas dan KKKS.

Untuk membangun jargas, dibutuhkan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan. Nantinya, di tiap rumah tidak hanya tersambung pipa gas, tetapi juga disediakan kompor dua tungku. Oleh sebab itu, Pemerintah juga mengharapkan di tingkat pelaksana agar dapat mencari inovasi untuk pekerjaan di lapangan sehingga lebih efisien.

Sementara itu, mengingat keterbatasan anggaran, saat ini tengah diinisiasi kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam membangun jargas. Jadi, nantinya secara perlahan, pembangunan jargas tidak lagi harus dilakukan Pemerintah, melainkan badan usaha atau swasta. Studi mengenai pembangunan jargas oleh badan usaha tengah dilakukan. Pemerintah mengharapkan dapat diperoleh kajian yang komprehensif serta rekomendasi yang tepat. Salah satu badan usaha yang telah menyatakan siap membangun jargas adalah PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. Konsep untuk kerja sama tersebut masih dalam pembahasan.

Biaya pembangunan satu sambungan di daerah yang belum tersedia fasilitas sekitar Rp11 juta. Namun, untuk wilayah yang fasilitas telah tersedia, dana yang dibutuhkan sekitar Rp7 juta. Pemerintah berupaya agar biaya pembangunan jargas dapat lebih ditekan sehingga badan usaha tertarik untuk berinvestasi.

Selain itu, dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada lokasi proyek pembangunan jargas tahun 2020, Ditjen Migas menetapkan Protokol Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga akibat Covid-19. Protokol ini dapat dijadikan pedoman di lapangan dan perubahan kontrak.

Dalam surat tertanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jargas tahun 2020, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso mengatakan, sebagai pedoman di lapangan, para kontraktor diwajibkan membentuk Satgas Pencegahan Covid-19 yang akan berkoordinasi dengan Ditjen Migas dan pihak terkait lainnya. Satgas tersebut juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sampai dengan level terendah sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan jargas di lapangan.

Kontraktor juga diminta menyiapkan tenaga ahli humas di masing-masing lapangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan jargas. Mereka harus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan jargas kepada masyarakat setempat paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor harus mengikuti dan menaati perintah yang diberikan oleh Muspida setempat terkait dengan kesehatan masyarakat dan para pekerja di lapangan. Tidak hanya itu, kontraktor juga wajib menempatkan paling sedikit satu tenaga kesehatan pada lokasi proyek dan berkedudukan di *site office*.

Pedoman lainnya adalah membuat kartu monitoring kesehatan semua pekerja, termasuk tukang gali di lapangan. Mengukur suhu tubuh; tetap menjaga jarak antar pekerja; melakukan disinfektan pada *site office*, tempat kerja di lapangan, dan tempat istirahat pekerja juga termasuk dalam pedoman. Setiap pekerja di lapangan wajib bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dalam pencegahan Covid-19 serta melaporkan apabila tidak sehat atau menunjukkan gejala-gejala Covid-19.

Pandemi Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana non alam sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi keadaan kahar *(force majeure)*. Apabila selama masa keadaan kahar, PPK dan penyedia sepakat untuk meneruskan pekerjaan dengan tambahan peralatan-peralatan yang menunjang *health care* penularan Covid-19, maka penyedia berhak menerima pembayaran sesuai dengan kontrak dan mendapatkan penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.

Apabila tidak dapat dihindari kondisi di mana pekerjaan harus dihentikan karena permintaan pemerintah daerah setempat yang tidak dapat ditolak terkait wabah Covid-19, maka kontraktor wajib mendapatkan biaya penggantian yang wajar untuk demobilisasi pekerja.

Selain jargas, pembangunan infrastruktur lainnya yang tetap berlanjut adalah konverter kit untuk nelayan dan petani. Terkait hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Komisi VII DPR sepakat untuk meningkatkan optimalisasi kegiatan infrastruktur tahun 2020 dari Rp235,725 miliar menjadi Rp350 miliar untuk penambahan paket kegiatan konverter kit untuk nelayan dan petani, penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS), dan sumur bor air tanah. ●

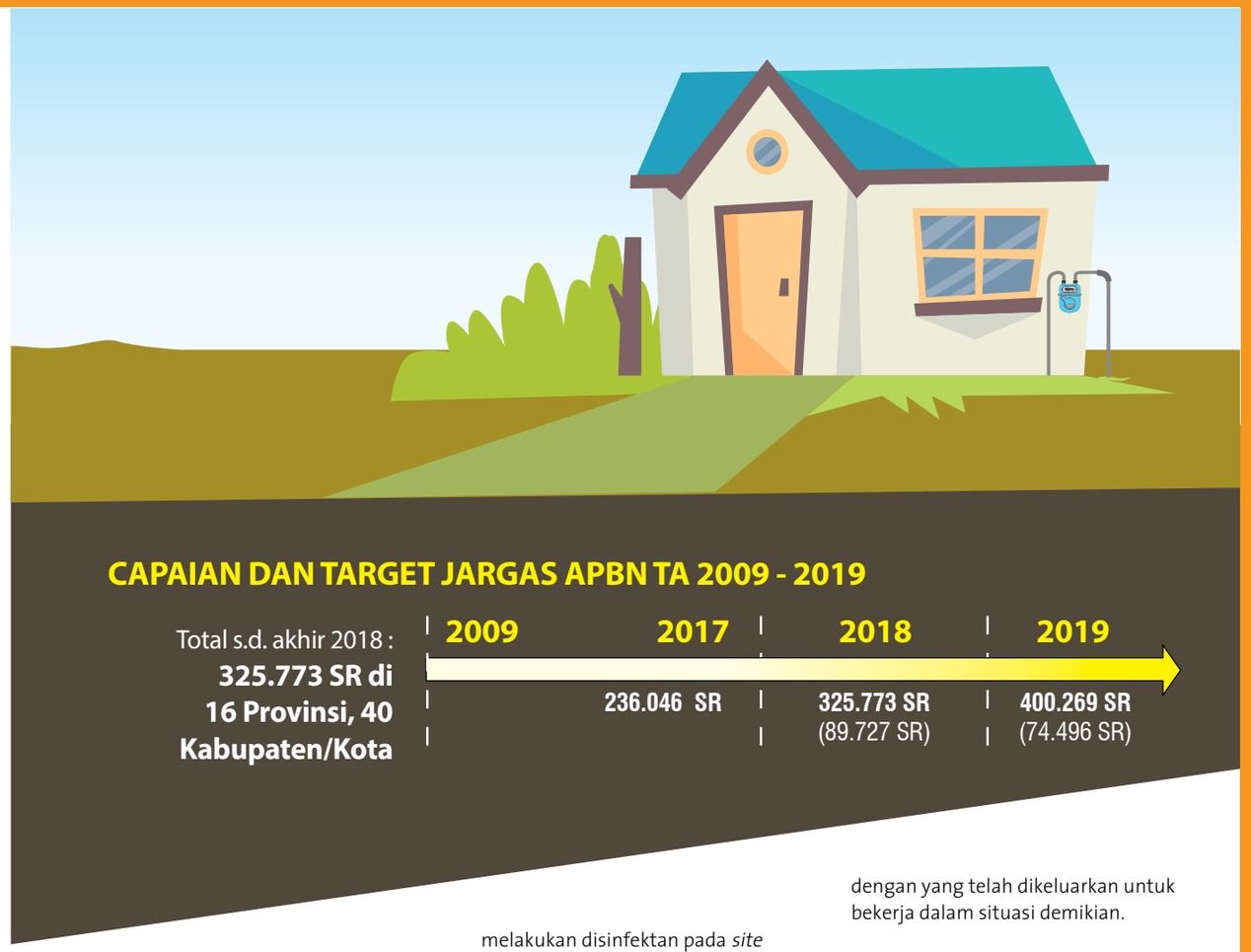

Migas *Data Repository* (MDR)
untuk Kemudahan Akses Data

Pada masa lalu, pengelolaan data migas kerap dianggap sebagai "data rahasia". Tak heran sejumlah kalangan menilai persoalan keterbukaan data migas menjadi salah satu tantangan untuk bisa meningkatkan minat investor di Indonesia. Kini, Pemerintah Indonesia terus berbenah memperbaiki diri dengan memberikan perbaikan pelayanan kepada publik.

Perbaikan pelayanan kepada publik itu disebut Migas *Data Repository* (MDR). MDR merupakan salah satu wujud konkret perbaikan pelayanan kepada publik di sub sektor migas setelah sebelumnya menyederhanakan perizinan.

Beragam manfaat

Pemerintah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas menjadi anggota MDR.

"Pemerintah telah memulai penerapan sistem keanggotaan untuk dapat mengakses data hulu migas. Pemerintah memberikan akses data kepada semua pihak yang membutuhkan, dengan akses sebesar-besarnya bagi pihak yang terdaftar menjadi anggota," ujar Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Rabu (5/2).

Sistem keanggotaan dalam MDR terbagi dua, yaitu anggota wajib (*mandatory member*) adalah KKKS dan afiliasi. Sementara anggota tidak wajib (*non mandatory member*) adalah badan usaha, bentuk usaha tetap, perguruan tinggi, dan unit pelaksana.

Sistem keanggotaan ini, Agus meneruskan, memberikan berbagai kemudahan akses kepada pengguna. Bagi anggota, misalnya, berhak mendapatkan seluruh akses, seperti spasial, metadata, *request* data, *view data*, dan *download* data. Sebaliknya, bagi non anggota, hanya dapat mengakses data spasial, metadata, dan *request* data. Untuk observer atau *free access*, hanya dapat mengakses data spasial dan metadata serta tidak dapat memanfaatkan data.

"Anggota dapat mengakses data dasar, data olahan, dan data interpretasi, sementara non-anggota hanya data dasar dan data umum. Pada dasarnya, data dasar dan data umum dapat diakses secara gratis," ujar Agus.

> **Anggota dapat mengakses data dasar, data olahan, dan data interpretasi, sementara non-anggota hanya data dasar dan data umum. Pada dasarnya, data dasar dan data umum dapat diakses secara gratis,"**
>
> **Agus Cahyono Adi**
> *Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian ESDM*

Saat ini, data yang tersedia dalam bentuk digital sekitar 150 *terabyte* (TB), yaitu *seismic 2D post stack* sebanyak 38.618 *line*, *seismic 2D field* data sebanyak 20.224 *line*, *seismic 3D* di 99 area, dan 11.054 *well*.

Untuk data fisik, tersedia 1,3 juta item, yaitu *seismic square tape, seismic round tape, well tape*, CD/DVD, *seismic display, seismic supp.doc, well log, well report, technical report, drawing map*, dan *rock sample*.

Besaran iuran untuk anggota telah ditetapkan sebesar US$50.000 untuk 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemilik lebih dari lima Wilayah Kerja (WK), US$40.000 untuk 41 KKKS yang memiliki dua sampai lima WK, US$20.000 untuk 80 KKKS dengan satu WK, dan US$35.000 untuk anggota tidak wajib. Biaya keanggotaan ini lebih murah dibandingkan usulan sebelumnya.

"Dulu kita rencanakan (biaya keanggotaan) lebih tinggi. Tapi, Pak Menteri (ESDM) memberikan arahan yang berbeda. Ayo, kita laksanakan bersama-sama sehingga kita dapat memiliki data yang lebih banyak dan lebih akurat," kata Agus.

Pemanfaatan data berlaku paling lama satu tahun, di mana untuk anggota berupa KKKS, badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perguruan tinggi terhitung sejak pembayaran iuran keanggotaan. Sementara itu, untuk non anggota, terhitung sejak persetujuan registrasi.

Keuntungan lain menjadi anggota MDR ini, para peserta lelang WK dibebaskan dari biaya data untuk seluruh penawaran WK migas. Biaya yang harus dibayar bagi peserta lelang WK migas yang bukan anggota MDR adalah maksimal US$80.000, dengan ketentuan satuan biaya ditentukan Pusdatin ESDM, bebas biaya selama masa lelang, wajib membayar biaya paket data apabila menang penawaran WK migas serta menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Untuk tahun 2020, Pemerintah berencana menawarkan 12 WK migas baru yang terdiri dari 10 WK migas konvensional dan 2 WK migas non konvensional.

Mengoptimalkan potensi sumber daya migas

Pemanfaatan data hulu migas tersebut diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 6 K/03/MEM/2020 tentang Pengelolaan National Data Repository Sektor ESDM dan Pelaksanaan Tugas Walidata pada Kementerian ESDM. Kepmen ini diterbitkan tanggal 6 Januari 2020 lalu.

Pada aturan tersebut tertera antara lain data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan memenuhi *quantity assurance*. Pendekatan ini bertujuan membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi data dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya dan berdasarkan standardisasi nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Walidata dan Pengelola NDR ESDM berkoordinasi dengan Pengelola Data, kementerian/lembaga terkait dan badan usaha/bentuk usaha tetap sektor ESDM.

Selain itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan yang diteken 31 Januari 2020 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Penetapan aturan ini juga dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan kemudahan akses kepada para pengguna data guna mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pelayanan pemanfaatan data hulu migas dilaksanakan melalui sistem keanggotaan dan non anggota.

"Sistem keanggotaan dalam pelayanan pemanfaatan data hulu migas mencakup tata cara keanggotaan dan pemanfaatan data oleh anggota dan non anggota terhadap seluruh data yang bersifat tidak rahasia atau telah melewati masa kerahasiaan," bunyi diktum kesatu.

Ditegaskan, hak pemanfaatan data hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak dapat dimasyarakatkan kepada pihak lain. Diatur pula bahwa anggota dapat melakukan pemasyarakatan hasil pengolahan data, dengan ketentuan yaitu telah menyepakati syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. Jangka waktu pemasyarakatan hasil pengolahan data paling lama lima tahun sejak pemberitahuan kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM dan dapat diperpanjang.

Pendeknya, pembukaan akses data hulu migas kepada seluruh pihak yang membutuhkan ini bertujuan untuk mengundang investasi di hulu migas agar potensi sumber daya migas dapat dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menyatakan, masih banyak lapangan yang belum masuk ke tahapan *Plan of Development* (PoD).

"Masih banyak, semisal Masela yang di 2027 kalau bisa dipercepat saja. Semua bahu- membahu, cari terobosan toh semua untuk rakyat," katanya.

Ego melanjutkan, diperlukan kegiatan yang berkesinambungan demi mendorong percepatan PoD lapangan migas yang ada. Salah satunya lewat sejumlah upaya eksplorasi yang telah dilakukan, perlu ada kegiatan pengeboran demi memproyeksikan cadangan yang ada.

Pada kesempatan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, "Perlu ada upaya eksplorasi baik pada lapangan lama (*mature*) dan daerah baru yang masih segar (*fresh*) dengan menerapkan metode, teknologi, dan konsep baru guna mempercepat produksi minyak".

Arifin juga meminta dilakukan pemutakhiran data migas agar lebih bisa memberikan gambaran potensi migas yang jelas kepada investor. Selain itu, perlunya reaktivasi dan evaluasi sumur-sumur minyak tua yang sudah tidak berproduksi dengan optimal. ●

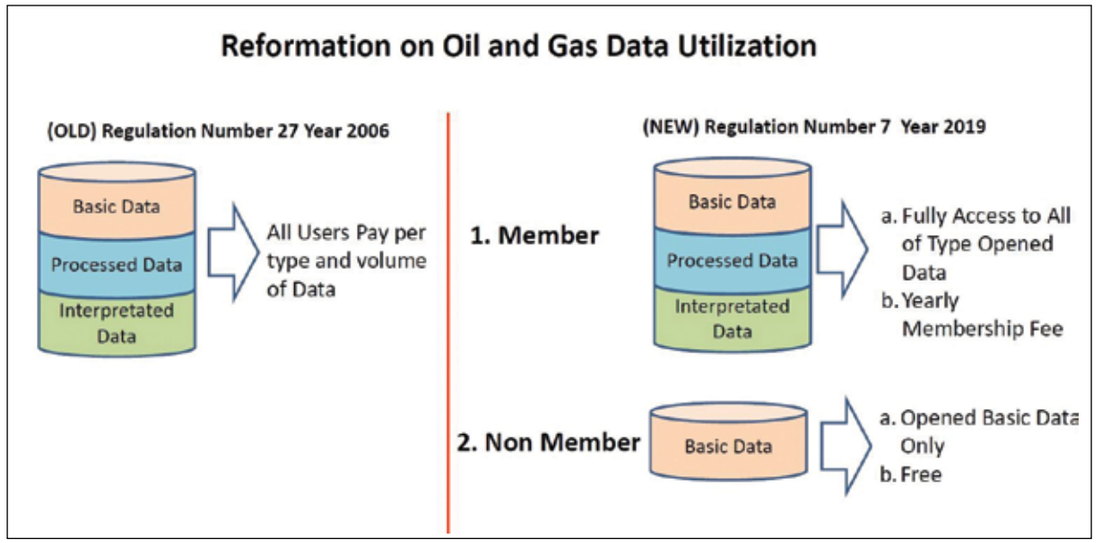

Aktif Cegah Penyebaran dan Penularan Pandemi Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menetapkan Novel Coronavirus atau Covid-19 sebagai pandemi, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Tak hanya itu, Pemerintah juga telah membentuk suatu Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di tanah air. Namun, keberhasilan untuk menghadapi Covid-19, sekali lagi, menuntut kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat Indonesia.

Peran aktif semua elemen masyarakat diperlukan guna memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19. Tanpa peran aktif masyarakat, berbagai kebijakan yang ditetapkan tak akan membuahkan hasil maksimal untuk memutus rantai penularan Covid-19. Peran aktif masyarakat ini bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Internal dan eksternal

Ditjen Migas, sebagai salah satu instansi Pemerintah, telah berupaya aktif mencegah penyebaran dan penularan pandemi Covid-19. Sejumlah kegiatan dilakukan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu kegiatan internal yang dilakukan ialah menyelenggarakan acara Sosialisasi Kesiagaan Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Auditorium Migas, Selasa (3/3). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang cukup mendalam kepada para pegawai Ditjen Migas mengenai Covid-19. Edukasi yang diperoleh ini diharapkan juga dapat disebarluaskan ke lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Lalu, dua hari berselang, Ditjen Migas membagikan 750 paket *medical kit* kepada seluruh ASN/ pegawai dan tenaga penunjang di lingkungan Ditjen Migas.

Dalam lingkup lebih luas, Kementerian ESDM telah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim reaksi cepat ini dibentuk melalui melalui Keputusan Menteri ESDM. Tim ini beranggotakan pegawai di lingkungan KESDM dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang bertugas melakukan langkah-langkah cepat, cermat serta terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk melakukan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ditempatkan di sejumlah provinsi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini antara lain membagikan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD), masker medis, masker nonmedis, sanitasi dan sebagainya ke beberapa fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, di berbagai provinsi.

Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ESDM juga telah menyerahkan bantuan fasilitas penunjang medis, yakni Disinfektan *Body Chamber* atau Bilik Sterilisasi dan Antiseptik (BiSA) kepada Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Kedokteran Universitas Indonesia (RSUI), dan Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dengan total sebanyak enam unit. Selain itu, Badan Litbang ESDM juga membuat ventilator mekanik yang sudah diuji coba antara lain di Rumah Sakit Pertamina Jaya.

Tak hanya itu, Ditjen Migas juga turut bersinergi dengan badan usaha (BU) dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan PT Pertamina Gas atau Pertagas. Pada Rabu (13/5) lalu, Pertagas menyalurkan bantuan berupa APD dan masker medis untuk para tenaga kesehatan melalui Ditjen Migas dengan total bantuan senilai Rp32 juta. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tenaga medis yang sampai saat ini masih berjuang merawat pasien Covid-19.

Perincian bantuan kali ini berupa sepuluh set APD yang terdiri dari baju *hazmat*, sepatu *boot*, kacamata gogle, dan penutup kepala. Selain itu, Pertagas juga menyalurkan 1.250 buah masker medis. Dengan bantuan itu, diharapkan tenaga medis akan semakin terbantu di tengah kondisi yang tidak mudah ini.

Kementerian ESDM juga terus memonitor kesehatan para pegawai secara berjenjang. Monitoring kesehatan para pegawai Kementerian ESDM dan SKK Migas yang berisiko Covid-19 telah dilakukan sejak minggu terakhir Maret 2020.

Di samping itu, sebagai upaya mitigasi menekan penyebaran Covid-19, Kementerian ESDM mengalihkan sementara semua layanan tatap muka menjadi layanan *online* atau daring melalui berbagai *link website* atau email. Meski demikian, pelayanan publik tetap berlangsung seperti biasa.

Ada juga pelayanan *Contact Center* ESDM 136 yang dialihkan sementara ke email contactcenter136@esdm.go.id demi melindungi kesehatan pegawai. Saat ini, layanan tersebut memiliki 12 agen *customer service officer* yang terdiri dari tujuh agen *call*, dua agen media sosial, dan tiga *team leader*.

Protokol kesehatan

Kementerian ESDM pun telah mengeluarkan berbagai protokol kesehatan. Pegawai Kementerian ESDM yang setiap harinya menggunakan transportasi publik ke kantor, misalnya, diizinkan untuk bekerja dari rumah masing-masing (*work from home*/WFH). Ketentuan ini juga berlaku kepada pegawai yang sudah berusia di atas 50 tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan pandemi Covid-19 dan juga untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempersilahkan pegawainya yang berusia di atas 50 tahun dan/atau pegawai yang setiap hari menggunakan transportasi publik (termasuk transportasi berbasis *online*) menuju kantor dan kembali ke rumah maupun menuju suatu tempat dalam rangka tugas, untuk melaksanakan tugas kantor dari rumah masing-masing," ujar Ego, Minggu (15/3).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran No.4.E/0/SJN.P/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pegawai Kementerian ESDM untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Surat ini ditandatangani Ego atas nama Menteri ESDM Arifin Tasrif, tertanggal 15 Maret 2020.

"Kebijakan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut yang ditetapkan Menteri ESDM," jelasnya.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pegawai yang melakukan kerja dari rumah tidak diperkenankan meninggalkan rumah selama jam kantor yang telah ditetapkan. Kecuali, untuk keperluan yang mendesak atas izin atasannya langsung.

Sedangkan untuk pegawai yang setiap hari menggunakan fasilitas kendaraan dinas atau kendaraan pribadi (mobil atau motor) diminta untuk tetap melaksanakan tugas di kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa, sesuai waktu yang ditentukan. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk para pejabat pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM.

Namun, apabila mengalami masalah kesehatan, seperti gejala awal terjangkitnya Covid19, mereka diminta melaksanakan tugas dengan bekerja dari rumah. Mereka juga diminta untuk segera memeriksakan kesehatannya kepada dokter atau tenaga medis di rumah sakit/klinik terdekat.

Kementerian ESDM juga menyerukan kepada para pegawainya untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, termasuk mal atau tempat lainnya yang tidak mendesak untuk didatangi. Begitu pula kepada para pejabat pimpinan tinggi, untuk sementara diminta membatasi kegiatan yang berbentuk seminar, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, *focus group discussion*, konsinyering serta kegiatan lainnya yang sifatnya dapat ditunda.

Protokol kesehatan juga diberlakukan di lokasi pembangunan proyek migas. Pada proyek jargas, contohnya, Ditjen Migas telah menetapkan Protokol Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga akibat Covid-19. Kebijakan ini dapat dijadikan pedoman di lapangan dan juga perubahan kontrak.

Kementerian ESDM juga menunda pembangunan sebagian proyek jaringan gas atau jargas tahun ini. Dengan begitu, kementerian dapat mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. Kementerian ESDM pun memutuskan hanya membangun 127.864 sambungan rumah (SR) di 23 kabupaten/kota atau senilai Rp1,3 triliun. Dengan begitu, terdapat realokasi dana dari proyek jargas tahun ini sebesar Rp1,72 triliun. Selain proyek jargas, Kementerian ESDM menunda program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke elpiji dan pembagian konverter kit (konkit) untuk petani dan nelayan. ●

Novel Coronavirus (Covid-19) adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Novel Coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS.

Gejala Klinis
- Demam
- Batuk, Pilek
- Gangguan Pernapasan
- Sakit Tenggorokan
- Letih, Lesu

Penularan
- *Droplets* atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
- Kontak pribadi
- Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya

Pencegahan
- Sering cuci tangan pakai sabun
- Gunakan masker bila batuk atau pilek
- Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah
- Hati-hati kontak dengan hewan
- Rajin olahraga dan istirahat cukup
- Hindari mengonsumsi daging yang belum dimasak
- Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan

Sumber: Kemenkes RI

Dongkrak Kinerja, Ditjen Migas Luncurkan "Si Merak"

Penulis : Agustiawan Mendrofa

Guna meningkatkan nilai akuntabilitas Ditjen Migas khususnya peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, Ditjen Migas meluncurkan aplikasi SI MERAK (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Rencana Aksi kinerja). Aplikasi ini merupakan salah satu wujud konkret upaya perubahan ke arah lebih baik di lingkungan Ditjen Migas dan juga dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi.

Latar belakang munculnya "Si Merak"

Ditjen Migas terus berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi Sub Sektor migas pada peningkatan devisa negara. Dalam rangka upaya tersebut, Ditjen Migas telah menyusun sejumlah program pengelolaan migas yang tertuang dalam program jangka pendek, seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); program jangka menengah, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan program jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Program-program perencanaan yang disertai dengan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran ini perlu dimonitor dan terus di evaluasi. Upaya monitoring dan evaluasi ini menjadi salah satu bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Penerapan SAKIP adalah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP di level Kementerian ESDM pada tahun 2017 adalah **71,34** atau predikat **BB.** Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil di Kementerian ESDM yang sebenarnya juga sudah menunjukkan hasil yang baik.

Di level eselon I Ditjen Migas, penilaian evaluasi pelaksanaan SAKIP pada tahun 2017 mendapatkan nilai **77,43** atau predikat **BB.** Namun, pada Lembar Kerja Evaluasi SAKIP terlihat bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi antara lain perlunya "Pengukuran Kinerja menggunakan Teknologi Informasi". Penggunaan teknologi informasi diperlukan sebagai solusi terhadap permasalahan dalam pengumpulan data implementasi rencana aksi pada proses pengukuran dan pelaporan kinerja serta perlunya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja yang dapat meningkatkan nilai SAKIP Ditjen Migas.

Manfaat "Si Merak"

Kehadiran "Si Merak" dapat meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja ini mencakup peningkatan kualitas pelaporan, proses dokumentasi hingga akses dan penyajian data.

Lebih rinci, manfaat pemanfaatan aplikasi "Si Merak" adalah sebagai berikut :

a. Mempermudah Pengelolaan dokumen data dukung sehingga Rencana Aksi dapat menjadi lebih efektif dan efisien
b. Proses pengajuan rencana aksi menjadi terdokumentasi dan mudah dipantau oleh pengguna
c. Mempermudah dan mempercepat dalam melakukan review dan verifikasi rencana aksi
d. Cepat dalam menyediakan informasi terkait kinerja unit
e. Data mudah di akses setiap saat

Manfaat Bagi Auditor atau Kemenpan

a. Kemudahan bagi evaluator dalam mengakses data rencana aksi serta implementasinya dalam rangka penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
b. Mempercepat proses *review* setiap rencana aksi
c. Mendapatkan informasi kinerja hingga eselon IV
d. Serta dapat mendongkrak nilai SAKIP Kementerian ESDM

Melalui aplikasi "Si Merak", pelaksanaan **Rencana Aksi** yang berisi strategi yang akan dilakukan untuk memastikan sasaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja terwujud akan termonitor. Selain itu, dengan memonitor rencana aksi, maka dapat mengidentifikasi keselarasan antara sasaran dengan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Fitur Aplikasi SI MERAK

Aplikasi ini memiliki fitur utama kemudahan menginputkan rencana aksi yang sesuai dengan penganggaran Unit, karena aplikasi SI MERAK terhubung dengan data RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) serta data dapat disandingkan dengan realisasi anggaran yang didapat dari unggahan data aplikasi SAS. Data yang dihasilkan juga akan bersifat *real time* sehingga mempercepat proses review dan verifikasi dan menyediakan *dashboard* untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan.

User hanya akan meng-*input* Target Rencana Kerja dan realisasi yang dicapai dalam bentuk *text* dan *upload* data dukung yang akan kemudian di evaluasi oleh *evaluator*. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian target, *user* dapat menginputkan kendala yang terjadi sesuai dengan fakta di lapangan.

Aplikasi SI MERAK juga termasuk aplikasi yang baru di lingkungan Kementerian ESDM dan merupakan salah satu inovasi yang dapat diterapkan di seluruh lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu, diharapkan ke depan akan adanya pengembangan dan integrasi dengan aplikasi perencanaan dan aplikasi monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Pada aplikasi tersebut dapat di monitor tingkat realisasi anggaran dan *input* rencana aksi yang dilakukan oleh unit-unit di DItjen Migas. Tentunya dengan terlaksananya *input* rencana aksi tentu sejalan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang tentunya juga sebanding dengan penyerapan/realisasi anggaran Ditjen Migas.

Hasil menggembirakan yang dicapai setelah penerapan aplikasi SI MERAK langsung dapat terlihat dengan meningkatnya nilai SAKIP Ditjen Migas pada tahun 2018 setelah sebelumnya hanya **77,43,** kemudian **naik menjadi 83,37.** Hasil ini cukup menggembirakan namun yang perlu dijaga adalah konsistensi serta kedisiplinan pengisian aplikasi SI MERAK. Namun aplikasi ini juga akan terus berbenah diri dengan terus menambah fitur-fitur yang dibutuhkan untuk menunjang akuntabilitas Ditjen Migas, salah satu penambahan fitur yang terakhir dilaksanakan adalah penambahan fitur "Risk Register" atau "Daftar resiko". Modul ini bertujuan untuk membuat daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Risk Register yang dibuat berdasarkan resiko masing-masing unit lengkap berisi sumber resiko, level dan tingkat resiko serta upaya pengendaliannya. Dengan adanya modul ini diharapkan Ditjen Migas dapat menginventarisir resiko-resiko yang dihadapi organisasi Ditjen Migas ke depan serta telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi resiko tersebut. ●

Agen Perubahan : Salam Perubahan

"Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian".

Berikut adalah kutipan terkenal oleh Albert Einstein, salah satu inovator terkemuka dunia. Perubahan menjadi sesuatu hal yang pasti. Dengan konteks saat ini, kehadiran era digital dan revolusi industri 4.0 memunculkan banyak tata nilai baru. Perubahan yang terjadi mengubah pola kehidupan bermasyarakat untuk menjadi lebih cepat, menuntut transparansi, *multitasking*, lebih cerdas, dan lebih cermat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemerintahan yang dapat bertindak responsif, antisipatif, dan inovatif.

Di sisi lain, birokrasi cenderung melembagakan rutinitas, formalitas, dan keseragaman. Birokrasi dan pelayanan sektor publik yang tersedia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil survei kepercayaan publik terhadap institusi negara dan lembaga oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada November 2019 (https://news.detik.com/berita/d-4783192/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-presiden-kpk-turun-usai-pilpres-2019), di mana terdapat penurunan kepercayaan publik sekitar 6% dibandingkan tahun 2018.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan birokrasi hanya dapat diatasi apabila pemerintah melakukan perubahan dengan mereformasi birokrasi dan sektor publik. Perubahan di sektor publik harus diinisiasi sejak dini dan mulai dari hal terkecil. Diperlukan suatu upaya yang dilakukan untuk terjadi sebuah perubahan. Bahkan untuk memasak mie instan, diperlukan waktu 3 menit untuk mengubahnya dari tekstur yang kering sehingga menjadi layak dikonsumsi. Tidak akan ada perubahan tanpa ada upaya yang dilakukan.

Dalam skala kecil, perubahan dapat dimulai dari diri sendiri dengan terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Contoh perubahan sederhana yang dapat diterapkan adalah penggunaan TOMAT (Tolong, Maaf, Terima kasih) dan 3S (Senyum, Sapa, Salam) pada kegiatan bekerja sehari-hari. Perubahan yang dilakukan harus menuju ke arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas maupun kesejahteraan pegawai.

Menurut Rhenald Kasali, karakteristik perubahan itu ada 5, yakni **sulit ditebak arahnya, tidak mudah, banyak harapan dan mitos, tidak dapat menyenangkan semua pihak, menularkan, dan harus dimulai dari pemimpin.** Perubahan itu butuh pengorbanan dan biasanya menuntut untuk keluar dari zona nyaman yang ada. Resistensi adalah hal yang wajar terjadi karena pro-kontra yang terbentuk akibat desakan untuk berubah. Apabila resistensi tidak terjadi, hal ini menunjukkan bahwa perubahan belum benar-benar terjadi dan belum menyentuh persoalan mendasar seperti *rent-seeking,* indisipliner, praktik KKN, dan praktik pemerintahan yang buruk pada sektor publik pada umumnya.

Perubahan harus dilakukan secara inklusif. Perubahan dan efeknya merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dan tidak boleh menegasikan peran seseorang. Agen Perubahan adalah sebagai katalisator dan pimpinan adalah kapten dari kapal perubahan, sedangkan yang menjalankan perubahan itu adalah semua pegawai. Perlu diingat bahwa pendorong utama dari sebuah perubahan adalah nilai, ideologi, dan visi yang diinternalisasikan sehingga tugas seorang pemimpin birokrasi adalah bagaimana menjual nilai-nilai yang diyakininya agar menjadi nilai bersama. Adapun nilai-nilai dari Kementerian ESDM adalah jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti.

Agen perubahan sebagai salah satu agen penggerak perubahan, memiliki peran dan tugas, diantaranya sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator dan penghubung antara pegawai dan para pengambil keputusan. Apabila dirangkum tujuan utama dari pembentukan agen perubahan ialah untuk membantu pimpinan dalam meyakinkan dan menanamkan nilai-nilai reformasi birokrasi agar dipahami dan diilhami setiap pegawai. Bentuk upaya yang dilakukan dapat berupa sosialisasi, *sharing session*, pemberian penghargaan pada pegawai teladan, survei kepuasan pegawai sebagai sarana untuk mengumpulkan pendapat, saran, dan masukan pegawai, serta kampanye nilai-nilai KESDM dan pentingnya reformasi birokrasi.

Dengan menerapkan semangat reformasi birokrasi untuk mengawal perubahan, diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan berkelas dunia (*world-class public service*) dan menerapkan model birokrasi yang relevan untuk menjawab semua tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian, ekspektasi publik yang kompleks dan berubah dengan cepat serta akuntabilitas publik yang semakin meningkat.

Perubahan.
Apakah hanya sekedar cita-cita semata? Atau menjadi sesuatu yang kita perjuangkan?

Pilihannya ada di tangan kita semua.

Perubahan.
Pilihlah untuk berubah. Dimulai dari diri sendiri dan saat ini.
Salam Perubahan. ●

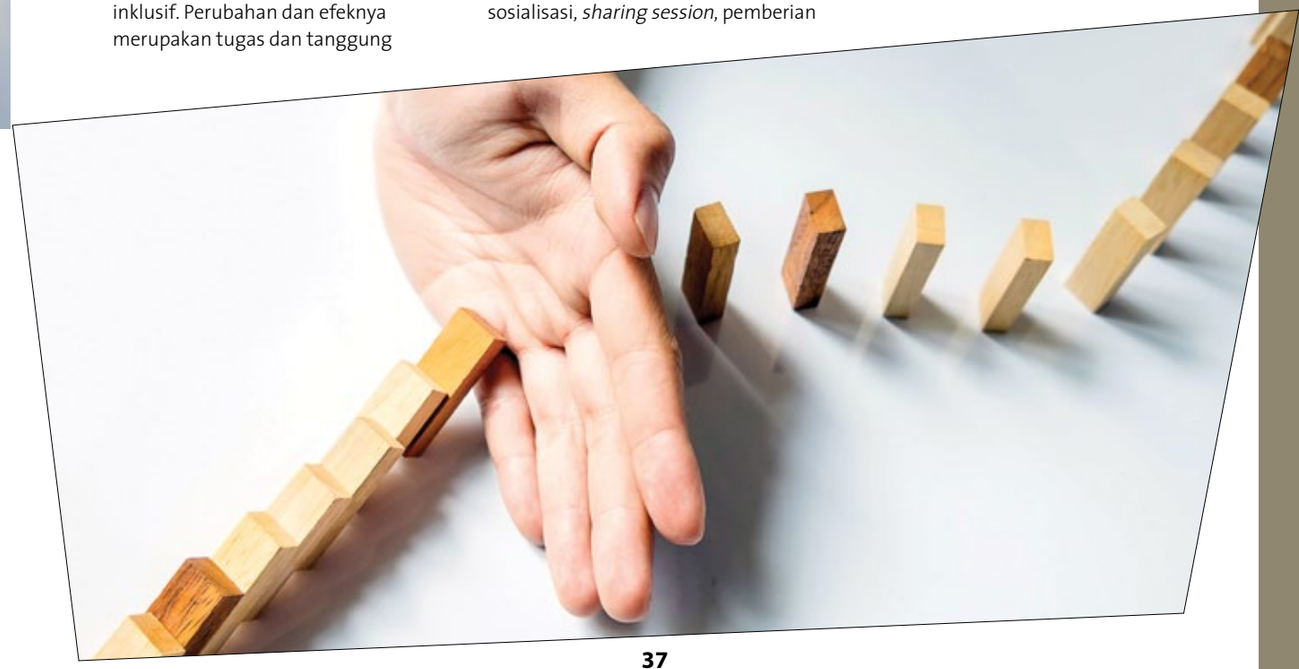

Tindak Lanjut DIPA Tahun 2020, Pejabat Eselon I dan II Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

Pejabat Eselon I dan para pejabat Eselon II Ditjen Migas menandatangani Perjanjian Kinerja bertempat di Ruang Strategis, Ditjen Migas, Jakarta, Selasa (14/1). Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini merupakan tindak lanjut diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020.

Penandatanganan Kinerja (PK) merupakan suatu kesepakatan antara pimpinan dan bawahan yang dituangkan dalam suatu dokumen. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman kerja selama tahun anggaran berjalan. Konsep PK ini disusun berdasarkan draft Renstra Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020–2024 yang telah disusun bersama-sama dengan menggunakan pola baru, yaitu *Balance Score Card* (BSC).

Pada Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan, penggunaan BSC untuk melengkapi dan membuat metode pendekatan perencanaan strategis menjadi semakin jelas dan sistematis serta mudah dipahami. Lebih khusus, indikator kinerja ESDM dan Ditjen Migas diharapkan akan lebih terukur dan jelas. Selain itu, monitoring dan evaluasi berjalan sistematis serta dapat meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan tunjangan kinerja.

"Acara ini diselenggarakan untuk memenuhi amanat peraturan yang telah diterapkan sehingga perjanjian kinerja ini dilakukan secara berkala, untuk mengikat dan mengingatkan komitmen bagi para ASN yang mempunyai tanggung jawab kedinasan maupun moral terhadap tugas yang diemban dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil," tutur Djoko.

Djoko mengajak jajaran pimpinan eselon II untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di tahun 2020. Hal ini karena Ditjen Migas mendapatkan amanat anggaran yang cukup besar, hampir 4 kali lipat tahun 2019.

"Tentunya kita ingin melanjutkan atau bahkan meningkatkan kinerja yang telah kita capai di tahun 2019," tambahnya.

Untuk tahun anggaran 2020 sendiri, Ditjen Migas mendapatkan pagu sebesar Rp4,115 triliun. Sebesar 92% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat; penawaran wilayah kerja (WK) migas; pembangunan infrastruktur jargas; paket konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; pembagian konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk petani dan nelayan; layanan perencanan dan pembangunan kilang; layanan verifikasi dan pengawasan implementasi mandatori B30; dan draft revisi Undang-Undang Migas.

"Dengan penandatanganan ini, kita semua berjanji, berkomitmen untuk mewujudkan target. Kita harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari capaian kinerja kita," kata Djoko. ●

Road to Zero Accident dan *Zero Unplanned Shutdown,* Ditjen Migas Gelar Pertemuan dengan KKKS

Sebagai upaya mencapai nihil kecelakaan pada kegiatan usaha hulu migas serta mencegah terjadinya unplanned shutdown, Ditjen Migas menyelenggarakan *Road to Zero Accident* dan *Zero Unplanned Shutdown* di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Jumat (10/1). Kegiatan tersebut merupakan pertemuan antara perwakilan Ditjen Migas dan Kepala Teknik serta Wakil Kepala Teknik dari berbagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo memimpin perwakilan Ditjen Migas dalam acara tersebut.

Keselamatan migas terdiri dari Keselamatan Instalasi, Pekerja, Umum dan Lingkungan, yang harus dilaksanakan oleh KKKS. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terutama ketika terjadi kecelakaan migas dan *unplanned shutdown*, sejumlah KKKS tidak menyampaikan laporan kepada Pemerintah c.q Direktur Teknik dan Lingkungan Migas sebagai Kepala Inspeksi. Padahal sesuai aturan yang berlaku, pelaporan ini wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksanaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggung jawab serta jaminan keselamatan kegiatan usaha hulu migas berada di tangan Badan Usaha. Sementara itu, Pemerintah bertugas membina dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik yang memiliki kompetensi.

Program *Zero Accident* dan *Zero Unplanned Shutdown* ini dicanangkan oleh Menteri ESDM pada Forum Komunikasi Migas. Program ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengecekan data dan identifikasi risiko yang akan dilakukan pada Desember 2019 hingga Maret 2020. Tahap kedua adalah peluncuran dan pelaksanaan program perbaikan yang dimulai Maret 2020 sampai tahun 2022. Selain itu, Ditjen Migas juga telah melakukan pertemuan dengan badan Usaha hulu dan hilir migas sebagai sosialisasi Program *Zero Accident* dan *Zero Unplanned Shutdown.*

Identifikasi Risiko akan dilakukan pada seluruh kegiatan usaha hulu migas, seperti *seismic, drilling, production* dan *gathering station.* Risiko akan diidentifikasi berdasarkan sistem, peralatan atau instalasi, pekerja, dari sisi Pemerintah maupun KKKS.

Selain hulu, Ditjen Migas juga menaruh perhatian sama besar terhadap keselamatan migas di sisi hilir. Salah satunya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Untuk mendukung pelaksanaan aturan terkait keselamatan migas di SPBU yang sebelumnya telah ditetapkan, sejumlah rencana aksi juga telah disiapkan, seperti pelatihan dan sertifikasi bagi operator, teknisi, dan pengawas SPBU di seluruh Indonesia. ●

Awasi Penyediaan dan Distribusi BBM, Kementerian ESDM Gandeng Polri dan Kemendagri

Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Idham Aziz, dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo Pernyataan Bersama tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI yang berlangsung di Kementerian ESDM, Kamis (9/1). Penandatanganan Pernyataan Bersama ini merupakan komitmen untuk memastikan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran dan volume.

Sebagai pelaksanaan kerja sama ini, dibentuk Satgas Kuda Laut yang dipimpin Kabareskrim Polri.

Pernyataan bersama akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis bensin premium yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2019 terjadi over kuota yang cukup signifikan sehingga memberatkan keuangan negara serta badan usaha.

"Dampak over kuota sangat besar. Dampak biaya, dalam hal ini alokasi APBN yang melebihi target. Di lain sisi, memang antara *supply* dan *demand*, sering terjadi gap karena usulan-usulan dari daerah memang di atas anggaran yang ditetapkan. Tapi, intinya adalah seluruh alokasi (BBM) ini sudah didasarkan atas data-data yang disusun jauh sebelumnya. Oleh karena itu, selain memberikan beban pada negara, terhadap badan usaha juga memberikan dampak karena *cash flow*-nya terganggu," papar Arifin.

Dalam kesempatan itu, Menteri Arifin juga menegaskan komitmen Kementerian ESDM yang tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan jajarannya. Sementara dari sisi badan usaha, melalui PT Pertamina (Persero), akan dipasang teknologi IT pada setiap *nozzle* di SPBU untuk mendeteksi kebenaran kegiatan penyaluran BBM ini. Namun demikian, baru sekitar 50% SPBU yang memasang peralatan ini.

"Kami minta dukungan aparat setempat, bagaimana men-*support* pemasangan IT ini dan ke depannya, tentu saja kita akan menggunakan mekanisme sistem penyaluran baru agar bisa menyalurkan BBM tepat sasaran," katanya.

Pada kesempatan sama, Kapolri Jenderal Idham Aziz meminta agar seluruh kesatuan di Polri untuk meningkatkan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut.

"Ini bagian dari komitmen, bukan bagian dari konspirasi untuk pelaksanaan distribusi BBM. Itulah yang saya bicara, nanti adik-adik saya di Polri yang akan menjabarkannya," tegasnya. ●

Ditjen Migas Paparkan Capaian Ditjen Migas 2019 dan Rencana Kerja 2020

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Djoko Siswanto didampingi para pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Migas menghadiri konferensi pers di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (14/1). Dalam kesempatan itu, Ditjen Migas menyampaikan paparan capaian kinerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020.

Capaian kinerja Ditjen Migas tahun 2019 antara lain:

- Penandatanganan tiga wilayah kerja (WK) baru, yaitu WK Anambas, Selat Panjang, dan West Ganal. Bonus tanda tangan sebesar US$37,6 juta dan komitmen pasti US$268,5 juta.
- Penandatanganan kontrak perpanjangan/alih kelola lima blok migas. Total komitmen kerja pasti US$855,38 juta dan bonus tanda tangan US$1,04 miliar.
- Penerimaan migas, yaitu PNBP SDA Rp119,48 triliun, PNBP fungsional US$324,85 juta, dan PPh migas Rp52,08 triliun.
- Investasi migas mencapai US$12,5 miliar, terdiri dari investasi hulu migas sebesar US$11,5 miliar dan hilir migas US$1 miliar.
- Alokasi gas domestik mencapai 64%.
- *Lifting* migas, yaitu *lifting* minyak 746 mopd, *lifting* gas bumi 1.060 mboepd, dan rata-rata ICP US$62,37 per barel.
- Pembangunan infrastruktur, yaitu jargas sebanyak 74.496 sambungan rumah (SR) di 16 kabupaten kota, konverter kit (konkit) nelayan sebanyak 13.305 paket di 38 kabupaten/kota dan konkit petani 1.000 paket untuk petani kecil di empat kabupaten/kota.
- Implementasi formula harga BBM baru, menurunkan harga BBM umum.
- Mandatori B20 yang capaiannya 98,13% dengan potensial saving dari pengurangan impor solar sebesar US$2,62 miliar.
- Perizinan *online* yang diluncurkan 6 Agustus 2019 yang terintegrasi dengan OSS dan Ditjen Migas, menerbitkan 235 izin usaha hilir migas dan 81 izin usaha hulu migas serta 90 non izin teknik dan lingkungan migas.
- Realisasi anggaran sebesar 96,89% dari pagu Rp1,12 triliun.

Sementara untuk tahun 2020, total anggaran Ditjen Migas sebesar Rp4.115,96 miliar, di mana 92,13% digunakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR di 49 lokasi, pembagian konkit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sebanyak 50.000 paket, konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sebanyak 522.616 paket serta layanan infrastruktur dan studi KPBU sembilan layanan.

Pemerintah juga akan meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri lebih dari 64% agar industri dalam negeri bisa memperoleh harga gas yang sesuai sehingga lebih efisien, seperti industri di negara-negara lain yang membeli gas dari Indonesia.

Rencana lainnya adalah *lifting* migas 755 mbopd dan *lifting* gas bumi 1.191 mboepd. Kemudian, mandatori B30 yang mulai dilaksanakan 1 Januari 2020. Mandatori B30 ini rencananya akan mencampur FAME 9,59 juta KL dengan potensial saving US$4,56 miliar. Untuk hulu migas, Pemerintah juga akan menawarkan 12 WK migas, terdiri dari 10 WK migas konvensional dan dua WK migas non konvensional. ●

Plt Dirjen Migas Lantik Kepala Susmar Baru

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Djoko Siswanto melantik Pejabat Baru Kepala Staff Urusan Maritim (Susmar) di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Selasa (14/1). Kepala Susmar yang baru diharapkan dapat bekerja dalam pola cepat, cermat dan produktif guna kelancaran pengoperasian migas di lepas pantai.

Karakter industri migas dengan sifat pengoperasian yang padat modal, teknologi, dan risiko membuat kegiatan usaha ini penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, dalam pengoperasiannya dibutuhkan pengamanan dan pengawasan, khususnya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di daerah lepas pantai.

"Guna melancarkan pengoperasian migas lepas pantai, maka staf khusus urusan maritim harus dikepalai oleh orang yang kompeten, bertanggung jawab dan penuh dedikasi," ungkap Djoko Siswanto dalam sambutannya.

Melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1/73/MEM/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penggantian Kepala Staff Khusus Urusan Maritim (Kasusmar) di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya R. Kolonel Laut Erwin Christiyadi Gora resmi diangkat sebagai Kepala Susmar yang baru.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan kepada R. Kolonel Laut Erwin Christiyadi Gora oleh Kasusmar sebelumnya yakni Kolonel Laut (Purn) Ludin Sirait, SE, MM, yang sejak tanggal 1 Desember 2019 telah memasuki masa pensiun.

Dengan diangkatnya Kasusmar yang baru, Djoko Siswanto berharap agar Kasusmar dapat mengemban amanat dengan penuh tanggung jawab, dedikasi serta dapat menjaga soliditas dengan instansi terkait dalam kegiatan migas di lepas pantai.

"Selain pengamanan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasi migas lepas pantai, peran Susmar juga sangat penting dalam upaya menjaga objek vital nasional, serta membantu penyelesaian persoalan-persoalan pada kegiatan migas dari ancaman internal maupun eksternal," imbuh Djoko. ●

Pengambilan Sumpah dan Janji 63 PNS Ditjen Migas

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji 63 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM bertempat di Ruang Sarula Kementerian ESDM, Selasa (4/2). Para PNS baru ini diharapkan mendorong munculnya gagasan-gagasan baru dalam pengembangan migas di tanah air.

"Kementerian ESDM tidak hanya memerlukan PNS yang memiliki kompetensi, tapi juga jujur serta memiliki integritas tinggi. Saudara harus mampu mengembangkan kompetensi, melakukan inovasi serta memberikan kontribusi terbaik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM dalam sambutan dalam acara yang juga dihadiri oleh para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian ESDM.

Sebagai generasi milenial yang didukung oleh kecanggihan teknologi saat ini, para PNS diyakini dapat cepat menyesuaikan dengan lingkungan kerja serta mampu mengembangkan kompetensi diri.

"Kalau generasi kami, mungkin butuh waktu lima tahun untuk mengejar kompetensi diri. Namun sekarang ini, di mana telekomunikasi berkembang pesat, paling hanya butuh waktu setahun untuk mengejar kompetensi," tutur Ego.

Sebanyak 63 PNS baru ini merupakan yang lolos seleksi penerimaan tahun 2018. Mereka terpilih setelah melalui seleksi ketat dari 3.022 pelamar. Para PNS baru tersebut ditempatkan dalam berbagai jabatan di unit-unit Kementerian ESDM, termasuk enam orang yang ditempatkan di Ditjen Migas. ●

Plt Dirjen Migas Hadiri *Groundbreaking* Pipa Transmisi Cirebon-Semarang

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menghadiri *groundbreaking* pembangunan pipa ruas transmisi Cirebon-Semarang (CISEM) di *Rest Area* KM 379A pada Jalan Tol Batang-Semarang, Jumat (7/2). proyek pembangunan pipa sepanjang 255 km tersebut diperkirakan menelan investasi sekitar US$169,41 juta dan *toll-fee* US$0,36 per mmbtu.

Groundbreaking proyek tersebut merupakan *milestone* berarti mengingat pekerjaannya sempat tertunda 13 tahun.

"Pembangunan proyek ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pemanfataan gas bumi domestik, sejalan dengan rencana Pemerintah menghentikan ekspor gas ke Singapura dan rencana penurunan harga gas untuk industri menjadi sebesar US$6 per mmbtu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," papar Ego Syahrial dalam sambutannya.

Infrastruktur ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah yang dilalui yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Proyek pembangunan pipa transmisi gas CISEM merupakan bagian dari proyek lelang transmisi gas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Proyek ini terlambat karena adanya kendala jaminan pasokan gas bumi yang bisa digunakan sebagai *base line* untuk pembangunan ruas pipa gas transmisi CISEM. Selain itu, juga terjadinya perbedaan asumsi keekonomian yang berubah saat ini dibanding tahun 2006.

Proyek yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) ini akan dibangun oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) dengan memanfaatkan ruas jalur tol Cirebon- Semarang. Jangka waktu pembangunan 24 bulan dan ditargetkan rampung 2022.

Pembangunan pipa transmisi juga merupakan bagian dari visi dan strategi Pemerintah dalam pengelolaan pemanfaatan gas bumi untuk mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *availability, affordability, accessibility, acceptability,* dan *sustainability.* ●

Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Minyak Baru

Komitmen Pemerintah untuk membangun kilang minyak baru (*Grass Root Refinery*) dan peningkatan kapasitas kilang eksisting (*Refinery Development Master Plan*/RDMP) tak surut. Pasalnya, kedua hal itu dapat mendorong ketahanan energi nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mengurangi impor.

"Untuk mengatasi berbagai kendala dan mendorong badan usaha agar mau membangun kilang, mengurangi impor dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait pembangunan kilang," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat mewakili Menteri ESDM dalam diskusi daring yang diselenggarakan Portonews, Sabtu (27/6).

Dukungan Pemerintah ini dalam bentuk berbagai kemudahan, seperti penyelesaian perizinan, percepatan penyediaan lahan, pemberian jaminan Pemerintah, penugasan kepada BUMN dan percepatan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 yang mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dapat dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Antara lain, PMK Nomor 188 tahun 2015 di mana diatur pembebasan pajak dalam rangka impor yaitu untuk barang modal selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sekali.

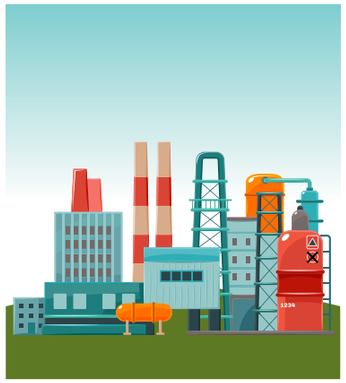

"Diatur pula pembebasan bea masuk untuk impor *raw material* selama 2 tahun. Ini juga dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya," papar Hidayat.

Selain itu, PMK Nomor 150 Tahun 2018 di mana dinyatakan bahwa dengan nilai invetasi paling sedikit Rp 30 triliun, dapat diberikan fasilitas *tax holiday* 100% selama 20 tahun dan ditambah 50% selama 2 tahun.

Pembangunan kilang minyak, lanjut Hidayat, harus dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan BBM, tetapi juga menghasilkan bahan baku yang dapat diproses lebih lanjut guna memperoleh produk-produk petrokimia yang akan memberikan nilai yang tinggi.

Seiring pertumbuhan ekonomi nasional, lanjut dia, kilang-kilang yang sudah ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Dalam 5 tahun terakhir, impor BBM mencapai 35% dari total kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2019, produksi BBM dari kilang dalam negeri sebesar 44,5 juta KL. Sedangkan impor BBM sebesar 24,7 juta KL, terdiri dari BBM jenis *gasoline* atau bensin sebesar 81,6% dan minyak diesel sebesar 15, 7%, serta sisa 2,7% merupakan BBM jenis lainnya.

"Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan dalam negeri, antara lain dengan pembangunan kilang ini. Dengan adanya kilang baru dan peningkatan kapasitas kilang eksisting, kita tidak perlu impor BBM lagi, " tegas Hidayat.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih, dalam kesempatan yang sama. Apabila semua proyek kilang, yaitu dua kilang minyak baru di Bontang dan Tuban, serta empat kilang RDMP di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap terbangun, Indonesia akan terbebas dari impor BBM pada tahun 2026.

Soerjaningsih memaparkan, berdasarkan prognosa, pada tahun 2022 diperkirakan ada tambahan produksi BBM dari RDMP Balongan. Rampungnya RDMP Balikpapan tahun 2023, juga menyumbang tambahan produksi.

Selanjutnya, produksi BBM juga akan bertambah dengan selesainya Kilang Bontang tahun 2025 dan tahun 2026, diharapkan terdapat tambahan produksi dari RDMP Cilacap dan GRR Tuban.

"Begitu adanya penambahan produksi BBM, tahun 2026 kita sudah lebih dari sisi suplai dibandingkan kebutuhan. Diharapkan mulai tahun 2026 kita tidak impor BBM dan bahkan mungkin bisa ekspor BBM," tegasnya. ●

Ditandatangani, Komitmen Jual-Beli Gas Blok Masela

Presiden Direktur INPEX Masela, Ltd Kenji Kawano, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkilfi Zaini, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) terkait jual-beli gas Blok Masela di Jakarta, Rabu (19/2). Penandatanganan ini makin memperjelas calon pembeli gas bumi dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari Lapangan Abadi, Wilayah Kerja (WK) Masela.

INPEX merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan menyuplai kebutuhan gas PLN dan Pupuk Indonesia dari Proyek LNG Abadi, WK Masela.

"Hari ini kita menyaksikan komitmen dari perusahaan nasional yang mempunyai ketertarikan memanfaatkan LNG yang dihasilkan Proyek Abadi untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik oleh PLN dan juga Pupuk Indonesia yang tertarik untuk membeli gas bumi sebanyak 150 mmscfd selama 20 tahun," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif usai menyaksikan penandatanganan MoU tersebut.

Arifin juga menyebutkan bahwa Kementerian ESDM mendukung MoU ini seiring dengan kebijakan konversi bahan bakar pembangkit listrik dari BBM ke gas.

"Saat ini, Pemerintah sedang melakukan konversi bahan bakar pembangkit dari BBM ke gas. Oleh karena itu, saya sangat mendukung MoU untuk rencana penyaluran gas dari lapangan Abadi ke PLN dan penyaluran gas ke industri pupuk dalam negeri," tutur Arifin.

Menteri Arifin berharap MoU ini dapat mendorong kepastian pengembangan Proyek Abadi Masela dan Engineering Procurement Construction (EPC) dapat dimulai pada 2022.

Nota Kesepahaman ini juga merupakan satu tahap pencapaian dari pengembangan Proyek LNG Abadi Masela. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dan industri hulu migas dalam memenuhi permintaan gas dari dalam negeri.

Lapangan Abadi Masela ditargetkan *onstream* pada Kuartal II 2027 dengan kumulatif produksi selama kontrak sebesar 16,38 tscf (*gross*). Adapun penjualan gasnya sebesar 12,95 tscf dengan kapasitas produksi Kilang LNG 9,5 mtpa, dan 150 mmscfd untuk gas pipa, serta produksi kumulatif kondensat sebesar 255,28 mmstb. ●

Upaya Membentuk Pemimpin Berkarakter, Ditjen Migas Adakan Diklat *Leadership*

Ditjen Migas mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) *Leadership* di Hotel Aston Sentul, Bogor, Jumat (28/2) hingga Sabtu (29/2). Diklat ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan wawasan guna mencetak pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ESDM, jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti.

"Melalui diklat ini, diharapkan para pemimpin dapat bekerja dengan pola cerdas, cermat dan produktif ("cecep") serta dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai Ditjen Migas," tutur Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adji, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial, ketika membuka acara tersebut.

Topik diklat *leadership* ini adalah "*Critical Thinking and Creative Problem Solving from Impossible to Possible*, Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju". Kegiatan diikuti oleh pejabat eselon II hingga IV, fungsional madya, pejabat pembuat komitmen (P2K) di lingkungan Ditjen Migas, serta Kepala Susmar. Hadir sebagai pembicara adalah *coach leadership* dan *motivator* Ainy Fauziah, serta produser dan sutradara film Mira Lesmana serta Riri Riza.

Sesditjen Migas memaparkan, ASN memegang peran penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk Indonesia ke depan. Di era globalisasi, digital, dan teknologi 4.0, diperlukan investasi melalui pengembangan SDM agar lebih maju dan unggul, khususnya dalam berpikir strategis, inovatif, dan profesional. Salah satu cara mencetak ASN berprestasi adalah melalui diklat *leadership*.

ASN harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai bidang atau wilayah kerja yang ditekuninya. ASN juga diharapkan mengubah *mindset* pola pikir dari penguasa menjadi pelayanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Ainy Fauziah dalam sesinya menekankan pentingnya bersikap terbuka, jujur, bekerja keras serta terus berbuat kebaikan.

"Sukses itu adalah melakukan apa yang kita bisa dalam hidup, pikiran serta pekerjaan. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita dapatkan karena sesungguhnya kerja tidak akan membohongi hasil," katanya.

Bekerja dengan sepenuh hati, akan berpengaruh pada hasil yang diperoleh kemudian. Setiap insan harus bangga pada hasil kerjanya, meski kecil artinya bagi pihak lain.

Ainy juga menggarisbawahi pentingnya seorang *leader* untuk meningkatkan kemampuan dalam memandang diri sendiri, menyampaikan pendapat dan memahami dampak sikap kepada orang lain. Termasuk juga bersikap tegas terhadap rekan kerja yang melanggar aturan kerja. ●

Ditjen Migas Gelar Raker Evaluasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2019

Ditjen Migas menggelar rapat kerja (raker) yang membahas evaluasi dan capaian kegiatan tahun 2019 serta rencana program kegiatan tahun 2020 di Bogor, Jumat (28/2). Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial memimpin acara yang turut dihadiri para pejabat eselon II, III, IV serta pejabat fungsional madya di lingkungan Ditjen Migas.

Dalam kesempatan itu, Ego Syahrial meminta agar para pegawai bekerja cepat, cermat, dan produktif sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga mengingatkan seluruh jajaran Ditjen Migas agar bekerja lebih keras lagi karena tantangan di masa depan masih banyak dan memerlukan sinergi semua pihak.

"Tantangan di depan kita masih banyak dan memerlukan kerja keras serta sinergi semua. Saya harap, prestasi yang telah dicapai oleh Ditjen Migas dapat ditingkatkan di masa mendatang," katanya.

Ego Syahrial juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar tiap-tiap Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mempercepat belanja modal, sebagai langkah mengantisipasi ekonomi global yang tak bersahabat akibat virus Covid-19.

Ego menyampaikan apresiasinya atas penyerapan anggaran Kementerian ESDM tahun 2019 yang mencapai 92%. Ini merupakan capaian terbesar selama 12 tahun terakhir. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran juga meningkat.

"Capaian ini antara lain berkat kerja keras teman-teman di Ditjen Migas karena sebagian besar anggaran ada di sini," tambahnya.

Pada raker ini, masing-masing unit eselon II menyampaikan program strategis tahun 2020, termasuk rencana pencapaiannya. Program-program strategis itu, misalnya target investasi migas, rencana induk pembangunan pipa gas bumi, lelang wilayah kerja migas, penurunan harga gas untuk industri, implementasi B30 dan subsidi LPG 3 kg.

Selain itu, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, konversi BBM ke LPG untuk nelayan dan petani, serta upaya mengatasi *illegal drilling* dan *road to zero accident* pada kegiatan hulu dan hilir migas. ●

Pertamina dan PLN Teken HoA, Pemanfaatan Gas Domestik Meningkat

PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) menandatangani *Head of Agreement* (HoA) terkait penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) untuk pembangkit tenaga listrik milik PLN, Kamis (27/2). Total penghematan dari konversi ini sekitar Rp3 triliun per tahun.

HoA ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 13K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Gasifikasi dari BBM ke LNG ini akan diterapkan pada 52 pembangkit PLN yang ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.

"Kerja sama ini akan menekan jumlah impor dan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi operasional PLN," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan tersebut.

Penekanan *beleid* ini dilatarbelakangi oleh kondisi neraca perdagangan minyak dan gas Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, komoditas migas minus US$1,18 miliar pada Januari 2020.

Melalui HoA tersebut, ditargetkan pembangkit listrik berbahan bakar diesel untuk dikonversi menjadi gas bumi dengan total kapasitas sekitar 1,7 gigawatt (gw) di 52 lokasi. Penyelesaian konversi ini dibagi menjadi empat tahap di mana untuk tahap pertama akan diselesaikan tahun 2020 ini sebanyak lima lokasi pembangkit listrik dengan total kapasitas 430 mw.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial dalam kesempatan yang sama mengatakan, dari total 1,7 gw pembangkit tersebut, mayoritas pembangkit berlokasi di Timur Indonesia.

"Dari total 1,7 gw, sekitar 77% kapasitas pembangkit berada di wilayah Timur Indonesia yaitu Maluku, Papua, Sulawesi, dan Bali Nusa Tenggara, sedangkan 33% berada di Nias dan Kalimantan. Indonesia Timur terus menjadi *concern* Pemerintah," ungkapnya.

"Pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri, dengan pembangunan infrastruktur gas seperti fasilitas LNG maupun pipa transmisi dan distribusi. Untuk Sumatera dan Jawa, pipa transmisi gas akan terhubung mulai dari Utara Sumatera hingga Timur Jawa. Ini terus dilanjutkan," ujar Ego. ●

Ditjen Migas-PAKKEM Gelar Serangkaian Webinar

Ditjen Migas dan Perkumpulan Ahli keselamatan dan Keteknikan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (PAKKEM) menggelar serangkaian diskusi virtual atau webinar seputar keselamatan migas.

Webinar pertama berlangsung pada Selasa (12/5) yang bertema "Membangun Kompetensi dan Budaya Keselamatan Migas". Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo selaku Kepala Inspeksi Migas menjadi salah satu narasumber webinar tersebut. Selain Adhi, narasumber lainnya adalah Edi Purnomo (Ketua Umum PAKKEM) serta moderator Dr. Waluyo.

Menurut Adhi, Kepala Teknik (Katek) berperan penting dalam mengurangi kecelakaan migas. Berdasarkan pengamatan, banyak Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kurang memahami atau mempedulikan peraturan migas.

"Mungkin Katek atau Wakil Kepala Teknik (Wakatek) tidak sempat membaca atau melihat peraturan karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi mau tidak mau, peraturan harus dipahami oleh Katek dan Wakatek karena ini penting agar keselamatan operasi migas terjaga," kata Adhi.

Pemerintah juga melakukan investigasi terhadap setiap kecelakaan yang terjadi. Investigasi dilakukan oleh Inspektur Migas bersama Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) di mana hasil investigasi tersebut untuk mencari root cause dari kecelakaan tersebut. Dari root cause tersebut, diperoleh pembelajaran (lesson learned) agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

"Hasil investigasi juga dituangkan dalam buku ATLAS Keselamatan Migas. Dapat juga dilihat dari pembelajaran tersebut mengenai perlunya kompetensi dan budaya keselamatan dalam operasi migas," tambahnya.

Tak lupa, Pemerintah memberikan penghargaan kepada BU atau BUT yang mampu menjaga keselamatan dalam kegiatannya.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk menekan kecelakaan migas adalah program Road to Zero Unplanned Shutdown di mana KKKS diminta memyampaikan program identifikasi resiko dan mitigasi resiko pada wilayah kerjanya.

Webinar selanjutnya berlangsung Rabu (20/5) siang yang mengupas Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM). Diskusi ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Kepala Subdirektorat Keselamatan Hulu Migas Ditjen Migas Mirza Mahendra, Lead Engineer Loss Prevention Qatargas Alvin Alfiyansyah, Senior Analyst QHSSE Pertamina Hulu Indonesia Syamsul Arifin dan Senior Consultant Phytagoras Timbul P. Gurning. Bertindak sebagai moderator adalah Ketua TIPKM Waluyo.

SMKM bertujuan menjamin terwujudnya operasi migas yang optimal, efektif dan efisien dengan menciptakan kondisi yang aman bagi pekerja dan masyarakat di sekitar instalasi, kondisi andal bagi instalasi dan kondisi ramah lingkungan.

"Tujuan lainnya, acuan dan pedoman bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) dalam mengembangkan dan melaksanakan keselamatan migas," kata Mirza.

Kerangka SMKM terdiri dari substansi, persyaratan, ekspektasi, program implementasi (prosedur dan penanggung jawab) dan indikator keberhasilan.

"Mengenai substansi, kami memakai istilah 'substansi' dan bukan 'elemen'. Kalau di sistem manajemen lain menyebut istilah 'elemen'. Kami di Kementerian ESDM menyebutnya 'substansi'. Kenapa demikian? Kami yakin di perusahaan pasti sudah memiliki sistem manajemen yang sudah dikelola dengan baik. Untuk itu, agar tidak mengubah sistem manajemen yang dimiliki, sepanjang substansi yang dimiliki sama, jadi tidak apa-apa (dipakai)," paparnya.

Substansi SMKM terdiri dari 10 substansi yaitu komitmen, kebijakan, kepemimpinan dan administrasi, manajemen risiko, manajemen operasional, manajemen aset dan instalasi, pelatihan, komunikasi dan budaya, manajemen pengamanan, manajemen krisis dan tanggap darurat, insiden dan jaminan pemenuhan, pemantauan dan pengukuran kinerja, serta audit dan tinjau ulang manajemen.

Webinar ketiga berlangsung Rabu (10/6). Kepala Subdirektorat Keselamatan Hilir Migas Ditjen Migas Wijayanto pada diskusi virtual mengenai Keselamatan SPBU dalam New Normal ini memaparkan, untuk meningkatkan keselamatan migas di SPBU, sejumlah rencana aksi telah disiapkan Pemerintah yaitu mengkaji ulang Pedoman Keselamatan SPBU seperti sistem Vapor Recovery Unit (VRU), SPBU Mini atau kios penyalur BBM dan SPBU Hub yaitu fasilitas unloading ke truk tangki BBM.

"Kecelakaan di SPBU banyak terjadi saat pengisian BBM dan faktor eksternal. Kita usulkan untuk mengkaji ulang pedoman keselamatan migas," kata Wijayanto.

Terkait kompetensi, Pemerintah juga akan mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk operasi SPBU. Ini harus dilakukan karena berdasarkan temuan di lapangan, banyak operator di SPBU ternyata bukan merupakan pegawai tetap. Teknisi pun dilakukan oleh pihak ketiga.

"Kompetensinya akan kita tingkatkan," tambahnya. ●

Lifting Migas Kuartal I Tahun 2020 Lampaui Target Teknis

Realisasi produksi migas siap jual (*lifting*) nasional hingga kuartal I tahun 2020 mencapai 1,749 juta barrel oil ekuivalen per day (boepd). Jumlah ini sebesar 90,4% dari target *lifting* nasional sebesar 1,946 boepd. Capaian ini juga berarti melampaui target teknis dalam *Work, Program and Budget* (WP&B) tahun 2020 sebesar 1,728 boepd atau mencapai 101%.

Lifting minyak kuartal I 2020 tersebut terutama dihasilkan oleh lima Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar di Indonesia, yakni:

1. Mobil Cepu LTD: 220 ribu bopd
2. PT Chevron: 182 ribu bopd
3. Pertamina EP: 81 ribu bopd
4. Pertamina Hulu Mahakam: 31 ribu bopd
5. Pertamina Hulu Energi OSES: 29 ribu bopd

Sementara itu, *lifting* gas nasional disumbang oleh KKKS:

1. BP Berau LTD: 1,05 mmscfd
2. COPHI Grissik : 828 mmscfd
3. Pertamina EP : 752 mmscfd
4. PHM : 610 mmscf
5. ENI Muara Bakau : 542 mmscfd

Lifting minyak di kuartal I tahun 2020 telah mencapai 701 ribu bopd atau 93% dari target APBN yaitu 755 bopd. Sementara *lifting* gas 5,86 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) atau 88% dari target APBN yaitu 6,67 mmscfd.

Meski belum mencapai target APBN mengingat kemampuan cadangannya, capaian ini telah didorong upaya optimalisasi serta pengembangan baru melalui pengeboran sumur baru, *onstream* proyek baru, dan pemeliharaan yang optimal. ●

Ditjen Migas Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Izin Usaha Niaga Migas

Ditjen Migas menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Izin Usaha Niaga Migas dengan tema "Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi", Kamis (25/6). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang transparan, efisien, dan tepat waktu sehingga dapat terus meningkatkan iklim investasi nasional.

Sosialisasi dan Konsultasi Izin Usaha Niaga Migas yang digelar secara virtual ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat dan diikuti oleh Badan Usaha niaga migas.

Mengawali sambutannya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat mengungkapkan, sinergi yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Ketahanan energi untuk komoditas migas salah satunya direalisasikan dengan peningkatan infrastruktur hilir migas seperti pengolahan, niaga, penyimpanan dan pengangkutan. Pemerintah bersama masyarakat bahu membahu untuk membangun negara, khususnya dalam bidang energi, demi mewujudkan ketahanan energi nasional.

"Meskipun dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terciptanya iklim usaha yang kondusif di Indonesia, diantaranya dengan pelaksanaan sosialisasi ini," ujar Hidayat.

Hingga saat ini, badan usaha niaga migas yang aktif tercatat berjumlah 204, terdiri dari 62 badan usaha niaga gas, termasuk niaga gas pipa, niaga LPG dan sebagainya, serta 142 badan usaha niaga BBM termasuk minyak bumi dan hasil olahan.

Hidayat menjelaskan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas khususnya kegiatan usaha niaga migas dilakukan dengan cara pelayanan pemberian izin usaha kepada badan usaha, pelayanan rekomendasi ekspor dan impor niaga migas, serta melaksanakan monitoring dan mengevaluasi kegiatan usaha agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif di bidang hilir migas, serta meningkatkan pelayanan usaha yang lebih efektif dan efisien, sejak tahun 2018 pelayanan perizinan hilir Migas telah dilaksanakan secara *online* melalui *website* perizinan. esdm.go.id/migas. Sementara untuk pelaporan masih dilaksanakan melalui perizinanmigas.esdm.go.id, untuk badan usaha yang telah memiliki akun di aplikasi tersebut dan dilaksanakan melalui email resmi Subdit Niaga untuk badan usaha yang belum terdaftar di aplikasi.

Melalui sosialisasi dan konsultasi ini, Hidayat berharap agar para peserta, baik yang belum memiliki Izin Usaha Niaga, maupun yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas, dapat memahami ruang lingkup kegiatan usaha migas, alur proses atau tata cara pengajuan izin niaga, dan persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan Izin Usaha Niaga. ●

Kuartal I 2020, Cadangan Migas 136,5 Juta BOE Ditemukan

Sepanjang kuartal I tahun 2020, Kementerian ESDM mencatat keberhasilan penemuan cadangan migas di tiga lapangan. Penemuan cadangan migas tersebut diperkirakan mencapai 136,5 juta barel setara minyak (boe).

Kementerian ESDM dalam siaran persnya, Sabtu (18/4), menyatakan, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada laporannya menjelaskan bahwa temuan tersebut terdiri dari satu temuan cadangan minyak oleh Texcal Mahato setelah menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi PB-2 Blok Mahato sebesar 61,8 juta barel minyak.

Selanjutnya, Medco E&P berhasil menemukan cadangan gas dari pengeboran sumur Bronang-2 sebesar 79 miliar kaki kubik gas (BCFG). Penemuan Lapangan Bronang menjadi penunjang pengembangan Lapangan Faroel sehingga produksinya bisa mencapai hingga 10.000 barel minyak per hari (BOPD).

Terakhir, cadangan gas sebesar 333,6 BCFG ditemukan Pertamina EP (PEP) dari hasil penyelesaian pengerjaan eksplorasi sumur Wolai-002 di Banggai, Sulawesi Tengah.

Atas temuan cadangan migas tersebut, Pemerintah mengharapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera mengusulkan proposal *Plan of Development.* ●

Pandemi Covid-19, Target Penerimaan Migas Tahun 2020 Direvisi Jadi Rp100,16 Triliun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menghadiri rapat kerja (raker) secara virtual dengan Komisi VII DPR, Senin (4/5). Dalam raker tersebut, Pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan harga minyak mentah dunia serta berbagai sektor lainnya, membuat Pemerintah merevisi target penerimaan negara dari subsektor migas yang semula Rp192,04 triliun menjadi Rp100,16 triliun.

Perubahan ini dengan asumsi *lifting* minyak bumi sebesar 735.000 barel per hari, *lifting* gas bumi 1.064.000 barel setara minyak per hari, ICP US$38 per barel dan kurs Rp17.500 per dolar AS.

Menteri Arifin memaparkan, semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp57,53 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp127,31 triliun, dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp7,3 triliun. Dengan catatan, *lifting* minyak numi 755.000 barel per hari, *lifting* gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP US$63 per barel dan kurs Rp14.400 per dolar AS.

Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas, target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp100,16 triliun, di mana PPh Migas ditargetkan Rp43,75 triliun, PNBP Migas Rp53,29 triliun, dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp3,12 triliun.

Menteri ESDM menjelaskan, penerimaan migas dipengaruhi oleh *lifting*, ICP, dan kurs. Sebagai contoh, apabila ICP US$40 per barel, maka PNBP Migas mencapai Rp58,11 triliun. Sebaliknya, jika ICP US$20, maka PNBP Migas hanya sekitar Rp9,93 triliun.

Demikian pula sensitivitas rupiah terhadap dolar AS. Jika kurs Rp14.000, maka PNBP Migas mencapai Rp35,12 triliun. Apabila rupiah melemah menjadi Rp18.000 per dolar AS, PNBP Migas naik menjadi Rp55,89 triliun. ●

Ditjen Migas Serahkan Bingkisan Lebaran untuk ASN Golongan I dan II serta Non ASN

Ditjen Migas menyerahkan 2014 bingkisan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan I dan II serta non ASN di Audiorium Migas, Senin (18/6). Penyerahan bingkisan ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Penyerahan bingkisan dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi secara simbolis kepada 15 pegawai. Penyerahan bingkisan dilakukan dengan tetap memperhatikan standar pencegahan Covid-19.

Mengawali sambutannya, Sesditjen Migas mengucap syukur karena pegawai yang hadir dalam keadaan sehat, meski Indonesia saat ini sedang dilanda Pandemi Covid-19. Diharapkan, pandemi dapat segera berlalu sehingga seluruh pegawai dapat beraktivitas seperti biasa.

Selanjutnya Iwan mengungkapkan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Ditjen Migas menyerahkan bingkisan lebaran kepada ASN golongan I dan II serta non ASN, sebagai bentuk perhatian pimpinan Ditjen Migas.

"Penyerahan bingkisan lebaran ini merupakan bentuk perhatian pimpinan Ditjen Migas untuk para pegawai golongan I dan II serta non ASN. Mudah-mudahan barokah, baik untuk pemberi dan penerimanya. Mohon bingkisan ini diterima dengan senang hati dan bermanfaat," tutur Iwan.

Hari Raya Idul Fitri 1441 H ini memang istimewa karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah juga telah menetapkan larangan mudik. Namun demikian, hal ini tidak lantas mengurangi makna hari raya. ●

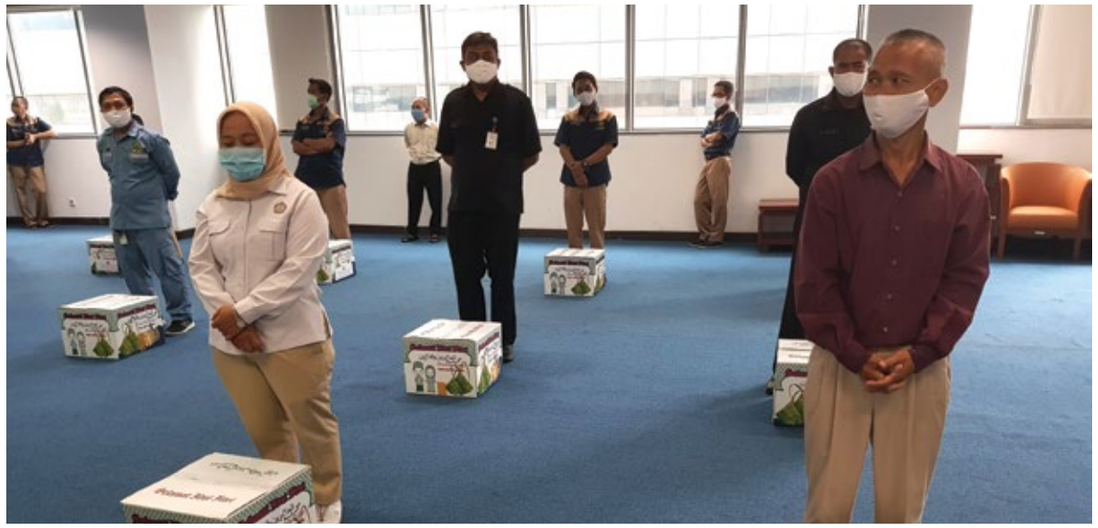

Dorong Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas, Ditjen Migas Fasilitasi Perizinan

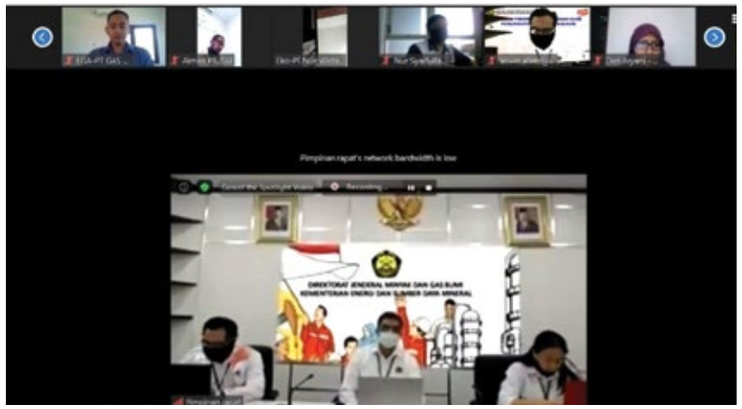

Guna mendorong kegiatan usaha pengangkutan migas di tengah pandemi Covid-19, Ditjen Migas menggelar Fasilitasi Perizinan Untuk Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas, Senin (22/6). Acara yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti 178 peserta ini merupakan fungsi pembinaan dan pengawasan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, khususnya pengawasan kepatuhan SPBE, serta dengan diterapkannya sistem aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi pada www.perizinan.esdm.go.id.

Kepala Sub Direktorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Dedy Wijaya dalam sambutannya mengatakan, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Izin usaha di bidang hilir migas dibedakan atas 4 izin yaitu Izin Pengolahan, Izin Penyimpanan, Izin Pengangkutan dan Izin Niaga Migas.

"Setiap armada yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan migas harus telah terdaftar dalam izin pengangkutan migas dari Pemerintah," ujar Dedy.

Selama pandemi Covid-19, pelayanan terkait perizinan kepada badan usaha tetap berjalan normal. Dalam periode 1 Maret hingga 9 Juni 2020, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas telah menyetujui penerbitan izin usaha hilir migas sebanyak 257 izin usaha, terdiri dari 4 Izin Usaha Pengolahan Migas, 17 Izin Usaha Penyimpanan Migas, 200 Izin Usaha Pengangkutan Migas dan 36 Izin Usaha Niaga Migas. Selain itu, telah diterbitkan 9 rekomendasi ekspor dan impor hilir migas.

Lebih lanjut Dedy memaparkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017, badan usaha yang telah memiliki izin, memiliki kewajiban melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan dan melakukan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan sarana dan fasilitas. Juga, melakukan perpanjangan izin paling lambat 3 bulan sebelum izin usaha berakhir.

Pelanggaran atas kewajiban itu dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha. Apabila melakukan tindak pidana untuk pengangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 53 butir b bahwa kegiatan pengangkutan migas tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp40 miliar.

"Saya ingatkan kembali, untuk perpanjangan izin usaha pengangkutan agar dilihat betul bahwa dalam peraturan dinyatakan 3 bulan sebelum perizinannya habis, harus segera diurus perpanjangan. Kalau misalnya 2 bulan sebelum izin berakhir baru diurus, itu tidak bisa diperpanjang lagi. Badan usaha harus mengajukan permohonan izin baru," tegas Dedy.

Menurut dia, banyak badan usaha yang kurang memperhatikan perpanjangan izin usaha ini, sehingga akhirnya harus mengurus izin baru. Dia menyarankan agar badan usaha sebaiknya mengurus perpanjangan jauh-jauh hari, misalnya sekitar 5 atau 6 bulan sebelum izin berakhir.

Acara ini disambut baik badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan migas serta perwakilan SPPBE LPG tabung 3 kg untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali dan NTB. Darmanto dari Pertamina MOR V menegaskan akan menaati peraturan yang berlaku. ●

Ditjen Migas Gelar Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas

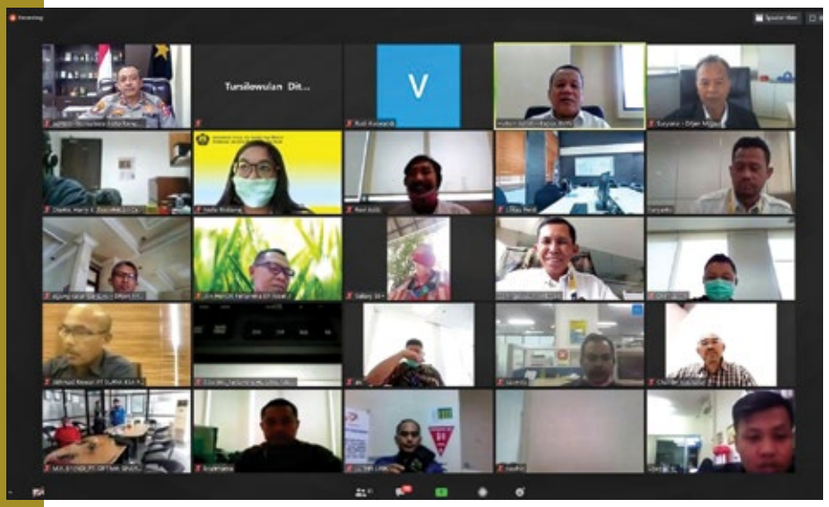

Ditjen Migas menggelar Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas Bidang Migas, Kamis (2/7). Acara yang berlangsung secara virtual ini turut dihadiri oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, Kepala BMN Kementerian ESDM Hufron Asrofi, Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Hari Prasodjo, serta badan usaha hulu dan hilir migas.

"Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pada fasilitas obvitnas bidang migas. Melalui kegiatan ini, diharapkan badan usaha migas dapat mencermati dan memahami terobosan-terobosan baru Polri untuk meningkatkan pengamanan obvitnas," ujar Adhi Wibowo dalam sambutannya.

Hufron Asrofi menambahkan, pengamanan obvitnas memerlukan kesadaran dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan *stakeholder*.

"Pemahaman pengamanan obvitnas tidak sesederhana dulu. Kita harus lebih waspada lagi. Mungkin perlu dilakukan revitalisasi regulasi terkait obvitnas karena ancaman gangguan ini tidak lagi seperti zaman dulu. Ada hal-hal lain yang perlu kita antisipasi," katanya.

Sementara itu, Polri Brigjen Pol. Hari Prasodjo dalam paparannya menyampaikan, Polri telah melakukan penyesuaian dalam pengamanan obvitnas. Pengamanan Polri tidak sekadar menjaga dan membawa peralatan, tetapi mengandung penegakan hukum atau tindakan-tindakan kepolisian secara terbatas. Sosialisasi diakhiri tanya-jawab dengan para peserta.

Pengamanan terhadap objek vital nasional (obvitnas), termasuk obvitnas bidang migas, harus dilakukan secara baik. Seiring dengan perkembangan dunia, pengamanan obvitnas tidak hanya berbentuk pengamanan fisik, tetapi juga pengamanan dari ancaman yang menggunakan teknologi.

Sebagai contoh, serangan drone yang mengakibatkan kebakaran terhadap dua fasilitas perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, pada 14 September 2019. Produksi minyak mentah harian Arab Saudi sempat berkurang sebanyak 5,7 juta barel per hari atau sekitar 5% dari produksi minyak global dan menyebabkan kenaikan tajam harga minyak di seluruh dunia, serta mengacaukan pasar keuangan global. Kejadian ini menyadarkan dunia bahwa ancaman terhadap obvitnas semakin canggih. Oleh karena itu, pengamanan terhadapnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Objek vital nasional (obvitnas) menurut Kepres No. 63 Tahun 2004 adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, serta harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh dari ciri-ciri, antara lain menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Obvitnas bidang migas sesuai Kepmen ESDM No. 77 K/90/MEM/2019 berjumlah 297, terdiri dari 95 obvitnas kegiatan usaha hulu migas dan 202 obvitnas kegiatan hilir migas. ●

Plt Dirjen Migas Tetapkan Aturan Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) LPG

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas menetapkan Keputusan Dirjen Migas No. 116.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis *Liquefied Petroleum Gas* yang Dipasarkan di Dalam Negeri di Jakarta, 30 Juni 2020.

Penetapan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Untuk mendapatkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, serta perkembangan teknologi, kemampuan produsen serta kemampuan dan kebutuhan konsumen, perlu ditetapkan kembali standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG yang dipasarkan di dalam negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas No. 26525.K/10/DJM.T/2009 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG yang Dipasarkan di Dalam Negeri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dirjen Migas menetapkan aturan ini.

Pada Keputusan Dirjen Migas No. 116.K/10/DJM/2020, Dirjen Migas menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG yang dipasarkan di dalam negeri yang terdiri dari standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG Campuran, LPG Propana dan LPG Butana, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dirjen Migas ini.

Pada saat Keputusan Dirjen Migas ini mulai berlaku, Keputusan Dirjen Migas No. 26525.K/10/DJM.T/2009 tertanggal 31 Desember 2009 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG yang Dipasarkan di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ●

Cegah Penyebaran Virus Corona, Ditjen Migas Bagikan Medical Kit

Ditjen Migas, Kamis (5/3) pagi, membagikan 750 paket *medical kit* kepada seluruh ASN/pegawai dan tenaga penunjang di lingkungan Ditjen Migas. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi kepada 10 pegawai. Pembagian *medical kit* ini guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Pemberian 750 paket *medical kit* ini merupakan bentuk perhatian Pimpinan Kementerian ESDM kepada seluruh ASN/pegawai dan tenaga penunjang yang bekerja di lingkungan Gedung Ibnu Sutowo Ditjen Migas agar senantiasa menjaga daya tahan tubuhnya sehingga terhindar dari wabah penyakit yang tengah berkembang saat ini di belahan dunia," kata Iwan dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, pemberian paket *medical kit* ini juga merupakan *trigger* agar seluruh ASN/pegawai dan tenaga penunjang di lingkungan Ditjen Migas senantiasa mengedepankan perilaku hidup sehat.

Selain membagikan *medical kit*, sebelumnya Ditjen Migas menyelenggarakan Sosialisasi Kesiagaan Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Auditorium Migas, Selasa (3/3). ●

Dengan Menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19, Menteri ESDM Lantik Tiga Pejabat Eselon II

Menteri ESDM Arifin Tasrif melantik dan mengambil sumpah tiga Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian ESDM di Ruang Sarula, Kamis (18/6) siang. Pelantikan dilakukan dengan mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Halini bisa dilihat dari pelantikan yang hanya dihadiri oleh pejabat yang dilantik serta petugas. Undangan lainnya menyaksikan secara virtual.

Ketiga pejabat yang dilantik adalah:

1. Muhammad Idris Froyoto Sihite, S.H., sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
2. Hufron, S.H., sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
3. Ir. Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro., M.Si., sebagai Direktur Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dua dari tiga pejabat yang dilantik ini merupakan hasil seleksi terbuka, yaitu Sentot Harijadi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta M. Idris F. Sihite yang berasal dari Kejaksaan Agung dan memiliki pengalaman di bidang hukum untuk memperkuat Biro Hukum.

Menteri Arifin dalam kesempatan itu mengatakan, meski dilakukan dengan protokol pencegahan Covid-19, tidak mengurangi makna pelantikan. Selanjutnya, pelantikan hendaknya jangan hanya dimaknai sebagai kegiatan rutin, simbolik, dan ritual semata. Tetapi, makna yang paling mendasar dari sumpah jabatan yang diucapkan, yaitu janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara serta janji kepada manusia. Janji ini tentunya harus ditepati dan dipertanggungjawabkan.

Saat ini, sektor ESDM sedang dilanda berbagai tantangan, seperti wabah Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian baik di Indonesia maupun dunia. Selain itu, harga minyak dunia yang sempat mengalami penurunan yang signifikan juga berpengaruh besar khususnya pada sektor ESDM. Namun, sektor ESDM tetap mampu melakukan yang terbaik untuk tanah air.

"Saya cukup merasa bangga karena pada masa yang sulit ini, kita khususnya di sektor ESDM tetap melakukan yang terbaik bagi negara," katanya.

Tantangan berat lainnya yang harus terus dihadapi di tengah pandemi ini adalah beberapa pembangunan infrastruktur dan pengerjaan proyek sektor ESDM diperkirakan akan mengalami perlambatan karena adanya pembatasan-pembatasan sebagai dampak penerapan protokol kesehatan.

"Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran sektor ESDM untuk mencari solusi dan terobosan pelaksanaan proyek sektor ESDM agar tetap dapat berjalan, namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan," tambah Arifin.

Mengakhiri sambutannya, Menteri ESDM mengajak semua pihak untuk memohon kepada Tuhan YME agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. ●

Upaya Mengoptimalkan Edukasi Pentingnya BBM Ramah Lingkungan

Kementerian ESDM menilai perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai oktan tinggi. Nilai oktan tinggi terbukti ramah lingkungan dan bisa mendorong hidup yang lebih berkualitas.

Hal ini mengemuka saat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, Jumat (12/6). Dalam kesempatan itu, Adhi menekankan, edukasi tidak dapat hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga harus melibatkan organisasi kemasyarakatan, badan usaha serta komunitas.

Adhi mengungkapkan, saat ini Pemerintah menyediakan BBM dengan berbagai kualitas, disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Di sisi lain, tuntutan sejumlah pihak agar Pemerintah hanya menyediakan BBM yang ramah lingkungan, juga makin menguat.

Regulasi emisi bahan bakar yang ramah lingkungan telah ditetapkan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) No. P.20/MENLH/SETJEN/KUM.1/3/2017, baku mutu kendaraan bermotor setara Euro 4 mulai diterapkan pada Oktober 2018 untuk kendaraan berbahan bakar bensin (gasoline) dan April 2021 untuk diesel (solar).

Selanjutnya, Dirjen Migas menetapkan SK Dirjen Migas Nomor 0177.K/10/DJM/2018 pada 8 Juni 2018 di mana ditetapkan bensin minimal nilai oktan 98 dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

"Jadi, dari aturannya sudah cukup (mendukung BBM ramah lingkungan). Namun menurut saya, masyarakat masih perlu diedukasi kalau mau sehat. Jangan pakai BBM dengan oktan rendah. Pakailah BBM yang kualitasnya lebih bagus dan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna," ujar Adhi.

Kementerian ESDM juga telah melakukan riset dengan sejumlah lembaga untuk memproduksi dengan kualitas yang lebih baik. Beberapa kilang dalam negeri pun dapat memproduksi BBM dengan oktan yang tinggi. Namun demikian, perilaku masyarakat yang masih memilih BBM dengan harga murah, membuat permintaan BBM nilai oktan 88 meningkat.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung BBM yang ramah lingkungan adalah pengembangan green refinery di Kilang Plaju dan Dumai yang menghasilkan produk green diesel.

Selain itu, Program B30 yang implementasinya mulai 1 Januari 2020 di mana berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 199 K/20/MEM/2019, alokasi biodiesel tahun 2020 ditetapkan 9.590.131 KL. Hingga Mei 2020, potensi penghematan diperkirakan US$1,08 miliar.

"Hasil tes kendaraan menggunakan B30 bagus, tidak kalah dengan BBM biasa," tutup Adhi. ●

Ditjen Migas Laksanakan Dua Tahap *Rapid Test* untuk Seluruh Pegawai

Bekerja sama dengan Rumah Sakit Yarsi, Ditjen Migas Kementerian ESDM di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (3/6) dan Kamis (4/6), menggelar *rapid test* bagi seluruh pegawai serta mitra kerja yang berada di lingkungan Ditjen Migas. Kegiatan ini merupakan deteksi dini pencegahan penyebaran Covid-19.

"*Rapid test* ini sebagai deteksi dini pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pegawai Ditjen Migas baik ASN maupun Non ASN, termasuk juga orang-orang yang berhubungan dengan kantor, seperti teknisi, petugas parkir, pegawai koperasi dan kantin," ungkap Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi dalam sambutannya pada acara tersebut.

Penyelenggaraan *rapid test* juga dimaksudkan untuk menambah rasa percaya diri pada pegawai yang akan kembali beraktivitas di kantor pada 5 Juni 2020. Selanjutnya, pada Kamis (11/6) dan Jumat (12/6), Ditjen Migas kembali menggelar *rapid test* tahap II. Secara keseluruhan, *rapid test* diikuti sekitar 750 orang.

"Pelaksanaan kegiatan *rapid test* Covid-19 hingga dua tahap, antara lain untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut, sesuai arahan pimpinan tertinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada seluruh jajarannya," kata Iwan dalam sambutan tertulisnya.

Dari hasil *rapid test* tersebut, terdapat sembilan orang ASN dan tenaga alih daya dengan status reaktif. Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, hanya satu di antaranya yang berstatus positif dan telah ditangani dan dipantau langsung oleh Tim Medis Ditjen Migas.

Perwakilan dari RS Yarsi Dr Andi Herlina mengapresiasi komitmen Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas dalam upaya melindungi para pegawai dari penyebaran Covid-19.

Dikatakan Andi, *rapid test* merupakan sistem cepat untuk mengetahui apakah dalam tubuh seseorang sudah terbentuk anti bodi dan bukan apakah kuman sudah masuk ke tubuh. Dia mengingatkan agar protokol pencegahan penyebaran Covid-19 seperti pemakaian masker, mencuci tangan, *physical distancing* harus tetap dilaksanakan.

"Semua yang sifatnya pribadi seperti pulpen, tidak boleh digunakan secara bergantian," tambahnya.

Dalam pelaksanaan *rapid test* ini, Ditjen Migas juga membagikan *medical kit* tahap 3 yang isinya antara lain vitamin, madu dan susu.

Selain menggelar *rapid test*, Ditjen Migas juga menyiapkan fasilitas untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Antara lain, menyediakan tempat cuci tangan di dekat *lobby*, pemeriksaan suhu tubuh pegawai sebelum masuk ke dalam gedung dan penyediaan *hand sanitizer*, *physical distancing* di lift dan pengaturan ruangan kerja. "Kita akan sangat memperhatikan protokol kesehatan. Pegawai masuk secara bergantian," kata Iwan.

Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, Ditjen Migas juga telah beberapa kali melakukan sosialisasi bagi para pegawai dan diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai Covid-19. Edukasi ini diharapkan dapat disebarluaskan ke lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. ●

Jelang Tatanan Normal Baru, Kementerian ESDM Tetapkan Sistem Kerja ASN

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial atas nama Menteri ESDM menetapkan Surat Edaran Nomor 14.E/70/SJN.P/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian ESDM. Surat Edaran ini guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian ESDM, serta guna mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kementerian ESDM dan masyarakat luas pada umumnya.

Surat edaran tertanggal 3 Juni 2020 tersebut, menurut Ego, memuat pedoman sistem kerja bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.

"Sekaligus mencegah dan mengendalikan penyebaran dan juga mengurangi Covid-19," papar Ego dalam Sosialisasi Sistem Kerja ASN di lingkungan Kementerian ESDM yang digelar secara virtual, Rabu (3/6) malam.

Untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, lanjut Ego, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN di lingkungan Kementerian ESDM yang dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah tempat tinggal ASN. Penyesuaian sistem kerja tersebut mencakup antara lain jenis pekerjaan pegawai, kemampuan dalam menggunakan alat kerja dengan teknologi informasi, kondisi kesehatan pegawai, tempat tinggal, dan sarana transportasi ke tempat kerja.

Dalam tatanan kerja normal baru, Kementerian ESDM akan membagi kriteria pegawai yang berstatus WFO dan *Work From Home* (WFH). Dalam SE ini, maksimal yang masuk kantor hanya 25% dari jumlah total pegawai di masing-masing unit organisasi.

Untuk menjaga kesehatan para pegawai, Kementerian ESDM juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang harus ditaati para pegawai yang WFO.

"Kita minta mulai berangkat dari rumah sampai ke kantor, menggunakan masker. Turun dari mobil, sebelum masuk gedung diukur suhu dan mencuci tangan," kata Ego.

Upaya lain yang dilakukan Kementerian ESDM adalah mewajibkan para pegawai melakukan rapid test yang diselenggarakan oleh unit masing-masing. Tes ini juga bertujuan memberikan kepercayaan diri kepada para pegawai yang hadir di kantor.

Terkait mitigasi Covid-19, sesuai arahan Menteri ESDM, dilakukan perluasan pemantauan penyebaran Covid-19 ke seluruh stakeholder. Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas, dikoordinir oleh SKK Migas. Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan dikoordinir oleh Ditjen Minerba.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini tercatat 387 pegawai Kementerian ESDM telah melakukan tes *polymerase chain reaction* (PCR) dengan bekerja sama Laboratorium Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia.

"Tiap hari terbatas 20 orang saja," terangnya.

Meski ASN di lingkungan Kementerian ESDM melakukan WFO secara bergantian, Ego optimis pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini lantaran pola kerja dengan sistem remote menggunakan teknologi informasi bukan hal baru di lingkungan Kementerian ESDM. Mengakhiri sosialisasi, Ego kembali mengingatkan para pegawai agar tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19. ●

Ditjen Migas Gelar Sosialisasi Kesiagaan Risiko Penularan Infeksi Covid-19

Ditjen Migas menyelenggarakan acara Sosialisasi Kesiagaan Risiko Penularan Infeksi Covid-19 di Auditorium Migas, Selasa (3/3). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman virus Covid-19 yang telah dinyatakan WHO menjadi status darurat global ke level tertinggi ini.

"Melalui sosialisasi ini, diharapkan kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai virus Corona atau Covid-19, termasuk bagaimana mencegahnya," ungkap Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Migas Mukti Yunarso, mewakili Sesditjen Migas.

Edukasi yang diperoleh ini, diharapkan juga dapat disebarluaskan ke lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga.

"Mengingat banyaknya info yang beredar di luar, melalui sosialisasi ini diharapkan para pegawai di lingkungan Ditjen Migas mendapatkan informasi yang benar mengenai virus Corona, menerapkan ke keluarga kecilnya, sekaligus menyebarluaskan ke lingkungan terdekat," katanya.

Mondy Ramdhani Eka dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia di bawah Kementerian Kesehatan RI, memaparkan, virus Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019 yang menyerang sistem pernapasan.

Faktor pemicu virus ini adalah tidak sengaja menghirup percikan air liur dari bersin atau batuk dari penderita virus Covid-19, kontak jarak dekat dengan penderita.

"Virus Corona atau Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi lebih berisiko menyerang orang tua, orang yang sedang sakit, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah," paparnya.

Gejala terinfeksi virus Covid-19 awalnya mirip flu. Pada hari pertama hingga ke tiga, gejala yang ditunjukkan adalah mirip masuk angin, sakit ringan tenggorokan, tidak demam, tidak lelah, namun masih makan dan minum secara normal.

Pada hari keempat, pasien mulai sedikit sakit tenggorokan, suara mulai serak, suhu tubuh berkisar antara 36,5 derajat Celcius, mulai anoreksia atau sulit menelan makanan dan sakit kepala, dan diare ringan.

Selanjutnya pada hari kelima, sakit tenggoran, suara serak, tubuh panas ringan, tubuh lelah dan merasakan nyeri pada persendian. Gejala hari keenam yaitu demam ringan sekitar 37 derajat Celcius, batuk dengan lender atau batuk kering, sakit tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan, mudah lelah disertai rasa mual dan sesekali sulit untuk bernapas. Juga, diare, dan muntah-muntah.

"Pada hari ke tujuh, penderita mulai demam lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sekitar 37,4 hingga 37,8 derajat Celcius, batuk dan dahak lebih banyak, nyeri pada tubuh dan kepala berbobot seperti batu (berat), serta diare dan muntah bertambah banyak," lanjut Mondy.

Kondisi pada hari kedelapan, demam di atas level 38 derajat Celcius dan sulit bernapas. Setiap kali bernapas, dada terasa berat dan batuk terus menerus. Penderita juga merasa sakit kepala, nyeri sendi, dan punggung. Hari kesembilan, gejala tidak berubah, malahan bertambah buruk. Demam berantakan atau semakin tinggi. Sementara batuk tidak mereda, tetapi lebih memburuk dari sebelumnya.

Sebagai deteksi dini virus Covid-19 ini, dapat dilakukan uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel darah serta rontgen dada.

Untuk menghindari virus ini, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah menghindari bepergian ke negara yang terinfensi virus, menggunakan masker pada saat beraktivitas di tempat umum, dan rutin mencuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan.

"Hindari kontak dengan hewan. Bila berkontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan juga memasak daging-dagingan sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Terakhir, jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan," papar Mondy. ●

Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai virus Covid-19, dapat menghubungi Kementerian Kesehatan di **(021) 5210-411** atau **081212123119**.

Ditjen Migas Siapkan Rencana Aksi Guna Tekan Kecelakaan di SPBU

Potensi kecelakaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih cukup besar terjadi. Oleh sebab itu, Pemerintah c.q Ditjen Migas terus berupaya menjaga keselamatan sekaligus menekan terjadinya kecelakaan di SPBU. Upaya ini tersusun pada sejumlah rencana aksi juga telah disiapkan.

Hal ini penting lantaran berdasarkan data Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas, selama periode 2016-2019, terjadi peningkatan kecelakaan di SPBU. Tahun 2016 dan 2017 masing-masing terjadi sembilan kecelakaan. Pada tahun 2018, jumlahnya melonjak menjadi 18 kecelakaan dan 2019 sedikit menurun menjadi 16 kecelakaan.

Kepala Subdirektorat Keselamatan Hilir Migas Ditjen Migas Wijayanto dalam diskusi virtual mengenai Keselamatan SPBU dalam New Normal yang diselenggarakan PAKKEM dan Ditjen Migas, Rabu (10/6), memaparkan, untuk meningkatkan keselamatan migas di SPBU, sejumlah rencana aksi telah disiapkan Pemerintah, yaitu mengkaji ulang Pedoman Keselamatan SPBU, seperti sistem Vapor Recovery Unit (VRU), SPBU Mini, atau kios penyalur BBM, dan SPBU Hub, seperti fasilitas unloading ke truk tangki BBM.

"Kecelakaan di SPBU banyak terjadi saat pengisian BBM dan faktor eksternal. Kita usulkan untuk mengkaji ulang pedoman keselamatan migas," kata Wijayanto.

Terkait kompetensi, Pemerintah juga akan mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk operasi SPBU. Ini harus dilakukan karena berdasarkan temuan di lapangan, banyak operator di SPBU ternyata bukan merupakan pegawai tetap. Teknisi pun dilakukan oleh pihak ketiga.

Rencana aksi lainnya adalah melakukan sosialisasi keselamatan SPBU melalui media sosial, membuat media audiovisual keselamatan SPBU, dan kemudian menyebarluaskannya sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Terakhir, mengusulkan penambahan kategori Penghargaan Keselamatan Migas untuk SPBU dan melaksanakan Audit SMKM khusus SPBU.

Data Kementerian ESDM juga menunjukkan, berdasarkan jenis kegiatan, sebanyak 85% terjadi pada saat pengisian BBM, 9% ketika pemeliharaan dan 6% saat penimbunan. Faktor yang menyebabkan kecelakaan di SPBU, sebanyak 56% disebabkan eksternal yaitu penggunaan jerigen yang tidak memenuhi standar, 29% lantaran modifikasi kendaraan seperti busi yang tidak tertutup, knalpot mengeluarkan api dan tangki BBM yang dibuat lebih besar. Faktor lainnya adalah internal SPBU sebanyak 15%.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ditjen Migas dan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM), kecelakaan di SPBU disebabkan oleh kurangnya kontrol dan inspeksi dari badan usaha, tidak kompetennya pengawas dan operator SPBU dan ketidakcakapan petugas SPBU menggunakan alat pemadam kebakaran (APAR). Penyebab lainnya, penggunaan jerigen yang tidak sesuai standar keselamatan.

Untuk menekan kecelakaan di SPBU, sebelumnya telah dilakukan sosialisasi keselamatan dengan Kepala SPBU, FGD Keselamatan SPBU dengan Pertamina, kerja sama dengan Pertamina dan LSP PPT Migas perihal kualifikasi dan kompetensi inspektur SPBU, membuat program Road to Zero Accident, merumuskan RSNI jerigen BBM yang sesuai standar keselamatan dan membuat Atlas Keselamatan Migas dan Buku Keselamatan SPBU. ●

Pemerintah Tetapkan Aturan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 34 K/16.MEM/2020 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Aturan ini ditetapkan tanggal 3 Februari 2020.

Dinyatakan dalam diktum kesatu aturan ini, Menteri ESDM menetapkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero), yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua, alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero) mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Negara (Persero) dan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Dalam hal diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik di regional lain dan/atau kebutuhan pembangkit lain, PT PLN dapat menggunakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan melaporkannya kepada Menteri ESDM.

Aturan ini juga menetapkan bahwa Menteri dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero).

Selanjutnya, dalam hal kontrak kerja sama antara Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Keija Sama (KKKS) berakhir, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero) dinyatakan tetap berlaku.

"Surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah terbit dan belum memiliki perjanjian jual beli gas bumi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terbit surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi diktum keenam.

PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi menyampaikan konfirmasi pengambilan volume alokasi Liquefied Natural Gas (LNG) kepada KKKS dan/atau penjual gas bumi setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun berjalan alokasi.

Dalam hal PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi mengonflrmasi tidak dapat mengambil volume alokasi LNG atau tidak menyampaikan konfirmasi, KKKS dan/atau penjual gas bumi dapat mengajukan permohonan perubahan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero), untuk selain penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri ESDM.

Diktum kesembilan menyatakan, PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi harus menyelesaikan perjanjian jual beli gas bumi dengan KKKS dan/atau penjual gas bumi, dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

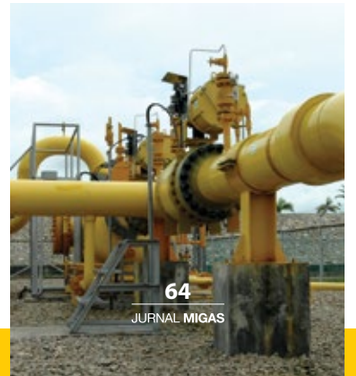

"Dalam hal PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi belum dapat mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan/atau belum ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli gas bumi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesembilan, KKKS dan/atau penjual gas bumi dapat mengajukan permohonan perubahan alokasi dan pemanfaatan gas bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk selain penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri ESDM," bunyi diktum kesepuluh.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1790 K/20/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selengkapnya mengenai aturan ini dapat dilihat di tautan https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2022/detail. ●

Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, **Fax.** (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id